

ISLAM DAN NEGARA SEKULER :
Menelisik Hubungan Negara dan Islam di Negara Sekuler Singapura¹
Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

Abstrak

Konstitusi Singapura menempatkan Melayu dan agama Islam pada posisi istimewa. Pada kenyataan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro-Islam yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah bahkan memproklamirkan Singapura sebagai negara sekuler. Bagaimanakah sesungguhnya cara pandang dan sikap negara/pemerintah terhadap agama Islam di Singapura? Bagaimana sifat dan karakteristik sekularisme yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Islam dan masyarakat Muslim dalam pengamalan Islam di negara Singapura yang sekuler? Islam seperti apakah (dalam makna interpretatif), atau pemikiran-pemikiran dan praktik Islam seperti apa pula yang memungkinkan terjalinnya hubungan secara baik antara pemeluk Islam dan negara di Singapura?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan dan metode penelitian sejarah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan metode triangulasi. Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui posisi istimewa Melayu namun karena kondisi dan realitas geopolitik membuat pemerintah menerapkan kebijakan multikulturalisme. Selain itu, pemerintah mengatur dan mengawasi secara ketat pelaksanaan agama Islam dengan mengkooptasi beberapa organisasi keagamaan dan menerapkan sejumlah regulasi dan aturan. Karena itu, paham sekularisme pemerintah bersifat strategis dan menggunakan double standar dalam memperlakukan Islam. Di satu sisi, terkesan mendukung dengan mengkooptasi, tetapi di sisi lain juga mengawasinya secara ketat. Maka, jenis Islam yang bisa menjamin terjalinnya hubungan yang baik antara umat Islam dan negara di Singapura adalah pemikiran dan aktivitas Islam yang tidak masuk ke ranah politik dan tidak pula mengancam keharmonisan antar warga negara.

¹ . Penelitian LPPM UIN Suska Riau, 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, Singapura dulu menjadi salah satu pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis memungkinkannya menjadi pintu transit perdagangan dunia antara Eropa, Timur Tengah, Timur Jauh, dan Australia² serta menjadikannya sebagai sentra komunikasi dakwah Islam dan pusat informasi Islam berawal sejak periode kesultanan Malaka (sebelum kolonialisasi Eropa), hingga masuk abad ke-20. Dengan demikian, Singapura memiliki peran penting dalam penetrasi Islam di Asia Tenggara.³

Selain itu, hubungan politik antara Islam dan negara kala itu bersifat akomodatif. Peran penting dan hubungan yang bersifat akomodatif tersebut berangsur-angsur memudar seiring dengan semakin kokohnya kekuasaan kolonial dan terus berlangsung sampai akhirnya Singapura berpisah dari Malaysia dan pada tahun 1965 membentuk negara republik; Muslim Singapura menjadi kelompok minoritas,⁴ seiring perjalanan waktu, minoritas Muslim yang mayoritasnya merupakan etnis Melayu menjadi *the second class* setelah etnis Cina.⁵

Dalam hubungan politik antara Islam dan negara, di awal kemerdekaannya pemerintah Singapura punya komitmen dan janji untuk senantiasa memberikan perhatian pada kepentingan Melayu dan agama yang mereka anut mengingat posisi mereka sebagai warga asli negara ini. Sehubungan dengan ini, menarik untuk melihat Konstitusi Singapura pasal 152 yang berbunyi sebagai berikut:

"It shall be a deliberate and conscious policy of the Government of Singapore at all times to recognize the special position of the Malays who are the indigenous people of the island and who are most in need of assistance and accordingly, it shall be the

2. Petra Weyland, "International Muslim Networks and Islam in Singapore" dalam *Journal SOJOURN, Social Issues in Southeast Asia*, Vol 5 Number 2, hlm. 219-254.

3. Helmiati, "Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pangalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekuler & Multikultural" *Toleransi :Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, ISSN: 2086-0315, Vol. 5 No. 2 Juli Desember 2013, hlm. 89.

4. Saat ini, muslim Singapura adalah kelompok minoritas yang hidup berdampingan dengan berbagai etnis dan beragam agama.⁴ Penduduk Singapura berjumlah 5.321.400 jiwa. Sebagian besar warga, yaitu 74.1% adalah etnis China. Etnis Melayu tergolong minoritas, yaitu 13.4 % dari total penduduk Singapura. Selanjutnya diikuti oleh India 9.2 %, 3.3 % Pakistan, Arab, dan lain-lain. Dari segi penganut agama, Muslim hanya berjumlah 15% dari total jumlah penduduk, 13.4% di merupakan etnis Melayu, dan sisanya adalah Muslim asal Arab, Pakistan dan India. Selebihnya mencakup 33% beragama Budha; 18% penganut Kristen; 17% tanpa agama; 11% penganut Taoism, dan Confusionism (Kong Hu Cu); 5.1% penganut Hindu, dan lain-lainnya 0.9%.⁴ Dengan komposisi seperti itu, Muslim Singapura adalah kelompok minoritas yang hidup dalam masyarakat multikultural dan multi religius. Lihat, Singapore Department of Statistics, *Singapore Census of Population 2010*, 12 Januari, 2011; Singapore Department of Statistics, *Pers Release : Census of population 2010: Statistical Release 1 on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion*. Diakses pada 4 September 2013.

5. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Alaf Baru dan LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 189..

responsibility of the Government of Singapore to protect, support, foster and promote their political, education, religious, economic, social, cultural interest, and the Malay language".

"Akan menjadi kebijakan yang disengaja dan disadari pemerintah Singapura sepanjang waktu untuk mengakui posisi khusus orang Melayu yang merupakan penduduk asli pulau (Singapura) dan yang paling perlu bantuan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah Singapura untuk melindungi, mendukung, mengangkat dan mempromosikan pendidikan, agama, kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahasa Melayu".

Dalam konstitusi di atas terlihat negara menempatkan Melayu/Muslim pada posisi istimewa yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam berbagai aspek termasuk agama. Dalam perkembangannya pemerintah memproklamirkan bahwa Singapura adalah negara sekuler.⁶ Laporan Komisi Konstitusi tahun 1966 menegaskan Singapura sebagai "*democratic secular state*"⁷ Pernyataan senada juga ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada *National Day Rally Speech* tahun 2009 bahwa "*the government has to remain secular*".⁸

Secara umum 'sekuler' dipahami bahwa negara netral dalam masalah agama; "tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama".⁹ Pemerintah hanya bertugas untuk menjaga stabilitas di dalam negaranya melalui berbagai perangkat hukum yang tegas. Agama adalah urusan pribadi, negara tidak mempunyai kewajiban dan hak mengatur dan mengelola pelaksanaan agama oleh warganya.

Sikap sekularistik negara/pemerintah berimplikasi pada beberapa kebijakannya yang kurang pro-Islam. Misalnya, *azan* yang dimaksudkan untuk memanggil Muslim melaksanakan shalat, tidak dibolehkan berkumandang menggunakan *loud speaker*. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah juga kurang berpihak pada upaya pelaksanaan ajaran agama Islam oleh minoritas Muslim negara ini. Hal ini misalnya tercermin dari larangan memakai jilbab (tudung kepala) bagi siswi Muslimah di sekolah-sekolah pemerintah. Larangan serupa juga pernah berlaku bagi perawat dan pegawai Muslimah saat bertugas di institusi-institusi pemerintahan tertentu.¹⁰ Kebijakan pemerintah lainnya adalah terkait penataan tempat tinggal (*New Strait Settlement*).¹¹ Kebijakan ini menyebabkan jamaah Muslim Singapura yang dulu menikmati kebersamaan dalam menjalankan agama, jadi terpecah dan terlepas dan terlepas dari jama'ah agamanya yang telah

6. Kamaludeen Mohammed Nasir, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, *Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 2

7. *Report of the Constitutional Commission*, 1966 (Chairman: Wee Chong Jin), Singapore: Printed by the Government Printer, 1966), OCLC51640681. Para.38

8. Prime Minister Lee Hsien Loong's *National Day Rally Speech* 2009 on 16 August (transcript), pmo.gov.sg, diakses tanggal 28 Maret 2015.

9. Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*, (Routledge, 2003), hlm.

10. "Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore", *Islam Online-net*. <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.

11. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media Bandung, 2011), hlm. 212. Bandingkan dengan *former strait settlement* dalam M.B. Hooker, *Islam in South-East Asia*, (Leiden: E.J.Brill, 1988), hlm. 170.

terbentuk secara alami,¹² sehingga konsekuensi lebih jauh, syiar Islam terasa makin lemah. Selain itu, berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional, pemerintah Singapura bersikap sebaliknya. Di sekolah-sekolah milik pemerintah tidak diperkenankan mengajarkan agama. Sekolah bersifat netral, dan agama menjadi urusan pribadi pemeluknya.¹³

Selain itu, menarik juga untuk mencermati dan mengkaji lebih jauh tentang hubungan negara dan agama ini di Singapura karena meskipun pemerintah memproklamkan Singapura sebagai negara sekuler, di sisi lain pemerintah tetap mengatur dan melakukan kontrol secara ketat terhadap penyelenggaraan agama melalui badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Pemerintah terlihat menerapkan standar ganda (*double standard*) dalam hubungannya dengan Islam. Di satu sisi pemerintah menyatakan bahwa negara Singapura bersifat sekuler dan agama adalah urusan pribadi warga negara, namun faktanya pemerintah mengatur secara ketat dan sangat mengawasi pelaksanaan agama, termasuk Islam.

Hubungan negara dan agama sebagaimana digambarkan di atas terutama analisis tentang sifat dan karakteristik sekularisme yang diterapkan oleh pemerintah Singapura serta bagaimana kebijakan politik pemerintah terhadap Islam dan Masyarakat Muslim di Singapura menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Hal ini menjadi menarik untuk dielaborasi lebih jauh sehingga menjadi gambaran bagi masyarakat Muslim terutama kelompok minoritas Muslim seperti di Singapura dalam bersikap dan mengelola kegiatan keagamaannya, selain menjadi pengalaman yang dapat mengilhami dan menginspirasi kaum Muslim di belahan bumi lainnya –khususnya Indonesia-- dalam menggairahkan kehidupan beragama.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneleliti lebih jauh beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana cara pandang dan sikap negara/pemerintah terhadap agama Islam di Singapura?
2. Bagaimana sifat dan karakteristik sekularisme yang diterapkan oleh pemerintah Singapura ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Islam dan masyarakat Muslim dalam pengamalan Islam di negara Singapura yang sekuler?
4. Islam seperti apakah (dalam makna interpretatif), atau pemikiran-pemikiran dan praktik Islam seperti apakah yang memungkinkan terjalinnya hubungan secara baik antara pemeluk Islam dan negara di Singapura?

C. Kegunaan Penelitian

Gambaran yang jelas mengenai cara pandang dan sikap negara/pemerintah terhadap agama Islam di Singapura; sifat dan karakteristik sekularisme yang

¹². Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, hlm. 212.

¹³. Helmiati, "Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura", *Laporan Penelitian*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014).

diterapkan oleh pemerintah; dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Islam dan masyarakat Muslim serta terhadap pengamalan Islam di negara Singapura yang sekuler; diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai hubungan Islam dan negara secara umum serta hubungan Islam dan negara sekuler khususnya. Selain itu, hal ini juga diharapkan memberikan gambaran yang jelas terutama bagi kelompok minoritas Muslim seperti di Singapura agar dapat menentukan Islam seperti apakah (dalam makna interpretatif), atau pemikiran-pemikiran dan praktik Islam seperti apa pula yang memungkinkan terjalinnya hubungan secara baik antara pemeluk Islam dan negara di Singapura, sehingga mereka dapat secara arif bersikap dan mengelola kegiatan keagamaannya. Uraian tentang pengalaman minoritas Muslim Singapura dalam pengamalan agamanya di negara sekuler juga diharapkan dapat mengilhami dan menginspirasi kaum Muslim di belahan bumi lainnya –khususnya Indonesia-- dalam menggairahkan kehidupan beragama.

Secara akademis, hasil penelitian ini pada gilirannya sangat berguna untuk pembaharuan bahan ajar mata kuliah Studi Islam Asia Tenggara (SIAT) dan Tamadun Melayu yang merupakan mata kuliah komponen wajib bagi seluruh mahasiswa UIN Suska Riau Pekanbaru. Selain itu, kajian SIAT dan Tamadun Melayu merupakan *distingsi* dan *excellence* yang membedakan UIN Suska dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya, sehingga UIN Suska diposisikan sebagai pusat Studi Islam Asia Tenggara. Karena itu, penelitian ini menjadi *urgent* mengingat mata kuliah SIAT dan Tamadun Melayu secara keilmuan tergolong relatif baru dan masih sangat terbuka untuk menjadi subjek penelitian dan pengembangan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi dan kajian dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan Negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. *Pertama*, dilakukan Lily Zubaidah, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*¹⁴ tahun 2009 yang memfokuskan pada bagaimana kebijakan pemerintah dan negara Singapura yang otoriter dan sekuler terhadap Islam. *Kedua*, dilakukan oleh Kamaludeen Mohamed Nasir dkk, *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*¹⁵ yang lebih memfokuskan pada bagaimana minoritas Muslim Singapura mempertahankan dan memelihara kesalehan mereka di negara yang secara politik menegaskan diri sebagai negara sekuler. *Ketiga*, penelitian Hussin Mutalib, *Singapore Malays, Being Ethnic Minority and Muslim in a Global City-State*¹⁶ yang lebih menyoroti tentang posisi dan dilemma minoritas Melayu Muslim di negara Singapura yang maju dan berbagai kebijakan negara. Berikutnya, penelitian yang saya lakukan dua tahun belakangan. *Pertama*, "Dinamika Islam dan Masyarakat Muslim Singapura: Menelisik Pengamalan Islam di

¹⁴. Lily Zubaidah Rahim, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*, Murdoch University and Asia Research Centre, Perth, Wester

¹⁵. Nasir, Kamaludeen Mohammed, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, *Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies*, New York: Routledge, 2010.

¹⁶. Hussin Mutalib, *Singapore Malays, Being Ethnic Minority and Muslim in a Global City-State*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series, New York, 2012.

*Kalangan Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekuler dan Multikultural".
Kedua, "Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura"*

Penelitian dan kajian sebagaimana dijelaskan di atas memiliki titik focus yang berbeda-beda termasuk juga dengan focus penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan melanjutkan penelitian penulis terdahulu. Bila yang pertama lebih menggambarkan bagaimana dinamika Islam di Singapura secara luas, yang kedua lebih focus pada aspek pendidikan dan yang ini akan lebih focus pada aspek politik yang melihat hubungan Islam dan negara di negara Singapura yang sekuler.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teoretisasi Politik Islam

“Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, *syari’ah*, dalam dua sumber sucinya –Alquran dan Sunnah, tradisi lisan dan tindakan Nabi Muhammad s.a.w. –bersifat permanen, tetapi aturan-aturan legalnya yang langsung bersifat terbatas; pada saat yang sama, turunan-turunan intelektualnya (sebagaimana ditunjukkan dalam berjilid-jilid karya fiqh) dan kumulasi tingkah-laku masyarakat Muslim sepanjang abad dan di tempat-tempat yang berbeda (seperti ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) bisa berubah dan luas cakupannya. Kedua bagian itu kadang-kadang bercampur dan membingungkan, bukan saja dalam pandangan beberapa pengamat dan sarjana non-Muslim, melainkan juga dalam pandangan beberapa jurubicara Islam yang bersemangat”.¹⁷

Hubungan politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara. Demikianlah, seolah-olah hubungan yang saling melengkapi antara keduanya tidak mungkin dibangun. Karena itu, cakupan ideologis dan kerangka konstitusional menjadi sangat penting dalam menentukan idealitas dan watak hubungan Islam dan negara. Karena itu, tinjauan umum terkait teoritisasi relasi Islam dan negara menjadi sangat penting sebagai landasan pemahaman.

“Agama dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia”.¹⁸ Sebagaimana ditegaskan Bahtiar Effendi:

“Islam adalah agama yang paling mudah menerima premis seperti ini dibandingkan dengan agama-agama lain. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana (*omnipresence*). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa dimana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”.¹⁹

Pandangan ini –menurut Bahtiar– membuat sejumlah penganutnya yakin bahwa Islam adalah cara hidup yang menyeluruh. Bahkan sebagian Muslim mengatakan bahwa “Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan”. Tidak dipertanyakan lagi bahwa

¹⁷. Fathi Osman, “Parameters of the Islamic State”, *Arabia: The Islamic World Review*, No. 17, Januari 1983, hlm. 10.

¹⁸. Howard M. Federspiel, *Muslim Intellectuals and National Development*, (New York: Nova Science Publisher, 1991).

¹⁹. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 6-7.

mereka meyakini karakteristik Islam yang menyeluruh dan sempurna, karena itu mereka memandang bahwa

“Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (*din*), agama; *dunya*, dunia; dan *dawlah*, negara)...[Karena itu], Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. [bagi kalangan Muslim ini] realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah “negara ideologis” yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap”.²⁰

Dalam konteks sekarang, tidaklah mengherankan betul, meskipun terkadang mengkhawatirkan, bahwa di dunia Islam kontemporer sebagian umat Islam ingin seluruh kerangka kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan politik secara eksklusif berdasarkan pada ajaran Islam, tanpa menyadari kendala-kendala yang akan terjadi. Meskipun ekspresi-ekspresi seperti ini ditopang oleh niat yang tulus, tak dapat disangkal bahwa semua itu dilandasi pemikiran yang kurang matang dan dalam realitasnya lebih bersifat apologetik.²¹ Gagasan-gagasan utama mereka, seperti disampaikan Mohammad Arkoun, “tetap terpenjara oleh citra kedaerahan dan etnografis, terbelenggu oleh pendapat-pendapat klasik yang dirumuskan secara tidak memadai dalam bentuk slogan-slogan ideologis kontemporer”. Seterusnya “artikulasi mereka masih tetap didominasi oleh kebutuhan ideologis untuk melegitimasi rezim-rezim masyarakat Islam”.

Pandangan holistik mengenai Islam seperti dijelaskan di atas memiliki sejumlah implikasi. Diantaranya, seperti dikemukakan Bahtiar Efendi, pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang “literal” yang hanya menekankan dimensi “luar” (*exterior*) nya. Kecenderungan semacam ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga berimplikasi pada terabaikannya dimensi “kontekstual” dan “dalam” (*interior*) dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, makna implisit dari “penampilan-penampilan tekstual”nya hampir terlupakan, kalau tidak terabaikan, maknanya. Pada contoh yang ekstrem, kecenderungan semacam ini “telah menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-Quran sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia”.²² Qomaruddin Khan menulis terkait sifat Islam yang holistik:

“Ada pandangan yang salah dalam pikiran sejumlah kaum Muslim dewasa ini bahwa al-Quran berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh pandangan yang keliru terhadap ayat al-Quran yang berbunyi *Dan Kami turunkan kepadamu Kitab*

²⁰. Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 63-64.

²¹. Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1982), dan bukunya yang lain, *Roots of Islamic Neo-Fundamentalism*, “Philip H. Stoddard, dkk (eds.), *Change and The Muslim World*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1982).

²². Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, hlm. 8-9.

*Suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Quran mengandung penjelasan tentang segala aspek panduan moral, dan bukan penjelasan terhadap segala obyek kehidupan. Al-Quran tidak berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan umum”.*²³

Mengakui *syari’ah* sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal lain. Ada beberapa faktor yang memberi pengaruh dan membentuk pemahaman umat Islam terhadap *Syari’ah*. Situasi kultural, sosiologis, dan intelektual sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman. Kecenderungan intelektual yang berbeda –apakah motifnya untuk mengetahui makna doktrin yang sebenarnya, yang secara literer terekspresikan dalam teks, atau untuk mengetahui prinsip-prinsip umum dari suatu doktrin, di luar ekspresi literer dan tekstualnya –dalam upaya untuk memahami *syari’ah* dapat berujung pada pemahaman yang berbeda mengenai suatu doktrin. Karenanya, kendatipun setiap Muslim menerima prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam *Syari’ah*, pemahaman mereka tentang ajaran Islam diwarnai perbedaan-perbedaan.

Munculnya berbagai mazhab teologi, fiqh dan filsafat Islam, misalnya, menunjukkan bahwa ajaran Islam itu multi-interpretatif.²⁴ Watak multi-interpretatif ini telah memainkan peran “sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selain itu, hal ini juga mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik”.²⁵

“Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual –karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik– akan berarti lain bagi orang Islam lainnya”. Begitu juga dalam melihat hubungan antara Islam dan negara. Sejalan dengan itu, “ia akan dipahami dan digunakan secara berbeda”.²⁶

B. Islam dan Negara

Relasi agama dan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu “*integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara”. Di negara-negara Barat, relasi agama dan negara dengan konsep sekularismenya dipandang telah final. *The Encyclopedia of Religion* menyebut paham ini sebagai “sebuah ideologi, di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung

²³ . Qamaruddin Khan, *Political Concepts in the Quran*, (Lahore: Islamic Book Foundation, 1982), hlm. 75-76.

²⁴ . Uraian historis-sosiologis yang panjang mengenai hal ini dapat ditemukan antara lain, dalam Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Vol. 1-111, (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

²⁵ . Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, hlm. 10

²⁶ . Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, hlm. 60-61

prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial”.²⁷

Sekularisme meniscayakan proses sekularisasi, yang dimaknai secara variatif. Peter L. Berger memaknainya sebagai “sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.²⁸

“Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marginalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropa selain Perancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Bahkan, sebagaimana dikata-kan Alfred Stepan, kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (*established church*) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia)”.²⁹

Pada negara-negara berkembang, juga terjadi sekularisasi politik dalam konteks modernisasi politik. Di beberapa negara Muslim modernisasi politik melahirkan proses sekularisasi yang kuat seperti terjadi di Indonesia pada masa-masa awal Orde Baru, atau bahkan menjadikan sekularisme sebagai prinsip kehidupan bernegara, seperti terjadi di Turki yang dibangun oleh Kamal Atatürk. Namun kemudian kecenderungan ini terkoresksi dengan munculnya kebangkitan agama dan perlawanan (*counter*) yang kuat terhadap sekularisasi yang bisa menghilangkan identitas suatu bangsa.

Terkait hal ini, pada beberapa dekade lalu Donald Eugen Smith mengatakan bahwa “sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara simultan. Namun menurut dia, sekularisasi ini betul-betul merupakan proses yang lebih mendasar, dan hal ini lambat laun akan melenyapkan fenomena partai politik dan ideologi keagamaan”.³⁰

Pada negara-negara Muslim, sekularisasi politik terjadi pada tingkat tertentu dalam hal-hal tertentu seperti pembentukan institusi-institusi negara modern sebagai implementasi sistem demokrasi pengganti dari institusi-institusi negara yang bersifat keagamaan, menyelenggarakan pemilu, membentuk partai politik, dan

²⁷. *The Encyclopedia of Religion*, vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company), hlm. 159.

²⁸. Lihat Gergely Rosta, “*Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe*”, dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm>

²⁹. Lihat Alfred Stepan, *The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The “Twin Tolerations”*, dalam [https://mail2.mphil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML/](https://mail2.mphil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project%20Manager-Constitution%20Process-Governance.EML/), hlm. 6-7.

³⁰. Lihat Donald Eugen Smith, *Religion and Political Development*, (Boston: Little Brown and Company, 1970), hlm. 124

seterusnya. Bahkan, pada negara-negara agama (*religious states*), seperti Arab Saudi dan Iran, secara terbatas proses sekularisasi juga terjadi yang mengintegrasikan agama dan negara dengan membuat regulasi-regulasi operasional tertentu yang pada sebelumnya telah diimplementasikan di negara-negara Barat sekuler, seperti aturan hukum terkait imigrasi, perdagangan internasional, imigrasi, dan lain-lain.

C. Islam dan negara dalam Perspektif Muslim

Berbicara dalam konteks masyarakat Islam, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bernegara. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi interpretatif, tidak pernah ada pandangan tunggal bagaimana seharusnya Islam dan negara dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda –beberapa bahkan saling bertentangan—mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan negara.

“Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Karenanya, bagi sebagian, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya –dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *Syari’ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini”.³¹

Dengan kata lain, dalam perspektif seperti ini, sistem politik modern ditempatkan pada posisi yang berlawanan dengan ajaran Islam.

“Pada ujung spektrum lain, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*”.³²

Seorang pemikir Muslim, Imara menegaskan:

“Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia

³¹. Abu al A’la al Mawdudi, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, dan Ali al Nadvi tergolong dalam kelompok pendukung pemikiran seperti ini. James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation State*, (Cambridge; Cambridge University Press, 1986).

³². Ahmad Syafii Maarif, “Islam as Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia”, *disertasi doktor*, University of Chicago, 1983, hlm. 23.

[untuk memikirkannya], dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini”.³³

Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan dalam al-Quran. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Quran yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa al-Quran mengandung “nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis” ...mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Untuk itu, bagi kalangan yang menganut pandangan ini, sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkan adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.³⁴ Dengan alur argumentasi semacam ini, Bakhtiar menambahkan:

“Pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa negara –karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama –menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara-bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentann dengan sistem politik modern”.³⁵

D. Sekularisme, Negara Singapura dan Islam

Terdapat sejumlah definisi terkait sekularisme. Sekularisme antara lain didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan atau negara harus berdiri terpisah dari agama/kepercayaan. Ada juga yang memaknai sekularisme sebagai sebuah paham yang menghindarkan manusia dalam kehidupannya me”referensi” kepada Allah dan agama. Sekularisme adalah paradigma yang memandang agama perlu terpisah dari negara. Agama dengan segala aliran dan multi tafsirnya adalah wilayah privat warga negara yang tak bisa mengatur negara atau diatur negara. Demikian sebaliknya agama tak bisa mengatur atau mempengaruhi negara. Dengan bahasa lain, ada juga yang memaknai sekularisme sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial. Ada juga yang menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pemisahan antara kehidupan

³³. Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Jadidah, 1979), hlm. 76-77. Dikutip dari Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, hlm. 64.

³⁴. Mohammad Husyan Haykal (Pemikir Mesir) dan Fazlur Rahman dan Kamaruddin Khan (pemikir Pakistan) termasuk pendukung pemikiran semacam ini.

³⁵. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, hlm. 14.

bermasyarakat dan segala yang berhubungan dengan pemerintahan dari masalah keagamaan, atau secara sederhana sekularisme adalah pemisahan antara agama dan politik. Sekularisme secara sederhana juga didefinisikan sebagai doktrin yang menolak campur tangan nilai-nilai keagamaan dalam urusan negara dan politik. Sedangkan negara sekuler berarti negara yang mengatur kehidupan warganya tanpa mengikutkan campur tangan nilai-nilai agama.

Uraian di atas menunjukkan spektrum pemahaman dan perbedaan pemaknaan terhadap sekularisme. Negara-negara yang menganut sekularisme meski bervariasi telah melakukan pemisahan seperti ini. Juga terdapat perbedaan pemahaman tentang sekularisme antara orang-orang di negara yang berpenduduk Muslim dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.³⁶ Bahkan di kalangan Muslimpun, konsep sekularisme memiliki pengertian yang berbeda. Reaksi mereka terhadap sekularisasi juga berbeda. Di satu sisi, ada intelektual Muslim yang melihat sekularisme sebagai suatu keburukan, karena memandang bahwa keagamaan tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷ Di sisi lain, ada yang menilai sekularisme cocok dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, penelitian tentang sekularisme telah menginspirasi beberapa sarjana Muslim yang memperdebatkan bahwa bentuk pemerintahan sekuler adalah jalan terbaik untuk menjalankan syariat Islam. Ditambah lagi, beberapa sarjana berpendapat bahwa bentuk pemerintahan sekuler telah ada di dunia sejak abad pertengahan.

Perbedaan dan ambiguitas tentang sekularisme dapat dikaitkan dengan pengalaman yang berbeda-beda antar negara yang menganut paham ini. Berawal dari pengalaman negara-negara Barat dalam sejarah mereka yang mengalami pemisahan gereja dari negara dan upaya selanjutnya oleh negara-negara non-Barat dalam penerapan sekularisme yang berasal dari ide Barat tersebut. Sekularisme Perancis, Inggris, Turki dan bahkan sekularisme Cina semua mewakili ide-ide yang berbeda tersebut.

Karena berbagai pendapat ini, perlu eksplorasi versi sekularisme yang diadopsi oleh negara Singapura. Saya berpendapat dalam nada yang sama bahwa ada versi yang berbeda dari 'sekularisme Singapura'.

Menurut Charles Taylor, ada tiga jenis sekularisme. Pertama adalah definisi sekularisme yang sering dikutip, yaitu pemisahan agama dari politik atau arena publik, atau dalam konteks Barat, pemisahan gereja dan negara. Kedua, sekularisme mungkin merujuk pada berkurangnya kepentingan keyakinan dan agama. Ketiga, sekularisme bisa berarti penggantian agama dengan sistem kepercayaan.³⁸

Agama masih memainkan peranan penting dalam kehidupan sebagian besar warga Singapura dan dengan demikian, proposisi kedua dan ketiga tidak pas atau tidak dianut dalam konteks Singapura. Sekularisme yang dipraktekkan di Singapura adalah yang paling mirip dengan tipe pertama yang disebutkan oleh Taylor. Namun, bahkan di sini ada peringatan. Sementara agama resmi seharusnya terpisah

³⁶. Talal Asad, *Formation of Secular: Christianity, Islam, Modernity*, (Stanford: Stanford University Press, 2003), hlm. 5-6.

³⁷. From the article on Secularism in Oxford Islamic Studies Online

³⁸. Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press), hlm. 1-22. Juga merujuk pada Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 106-107.

dari politik, negara melakukan sedikit intervensi pada hal-hal yang mereka pandang perlu. Oleh karena itu sekularisme versi Singapura hampir cocok dengan salah satu dari tiga kategori Taylor terlepas dari retorika konstan politisi Singapura 'bahwa agama harus dipisahkan dari politik.

Keinginan nyata negara untuk memisahkan agama dari politik mengalami dua masalah utama dalam berurusan dengan komunitas Muslim. Pertama, gagasan sekularisme adalah salah satu masalah yang harus didamaikan dengan keyakinan Islam. Gagasan bahwa apapun, termasuk politik, dapat dipisahkan dari doktrin Islam bertentangan dengan keyakinan fundamental umat Islam bahwa Islam mencakup setiap aspek kehidupan.³⁹ Oleh karena itu, mengasingkan Islam ke wilayah pribadi tidak akan mudah diterima oleh umat Islam. Karena setiap Muslim akan mengatakan, Islam bukan hanya agama, melainkan, itu adalah cara hidup. Muslim Singapura juga tak jauh berbeda, banyak diantara mereka yang meyakini bahwa adalah pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya mengatur urusan ibadah.⁴⁰

Sebagian besar intelektual Muslim telah lama menentang sekularisme dan telah mengartikulasikan ketakutan mereka bahwa mengurangi Islam ke wilayah pribadi tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tapi akhirnya akan melahirkan pandangan dan membuat Islam menjadi tidak penting. Selain itu, penolakan mereka terhadap sekularisme juga karena hal ini diyakini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tauhid dan *ad-diin* yang menegaskan bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan.

Hal ini lebih diperparah oleh konotasi negatif yang dicakup sekularisme. Sekularisme dianggap oleh banyak Muslim menjadi konstruk Barat yang tidak berlaku untuk pengalaman Asia atau Islam. Asad berpendapat bahwa term sekularisme dikarang oleh ateis Inggris untuk menghindari dicap dengan istilah yang merendahkan seperti "kafir".⁴¹ Pandangan "sekuler" yang tak menyenangkan semacam itu tidak jarang terdapat di kalangan Muslim. Contoh ekstrim dari penolakan konsep sekuler ini adalah Jemaah Islamiyah (JI), kelompok teroris Muslim yang merencanakan pembentukan negara Islam untuk menggantikan tatanan sekuler di Asia Tenggara.

Masyarakat Muslim yang berbeda bereaksi secara bervariasi terhadap sekularisme. Sekularisme Turki menunjukkan kemiripan dengan sekularisme versi Barat, meskipun bahkan ini tampaknya berubah sejak Tayyip Erdogan terpilih pada tahun 2002. Di Malaysia Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dibentuk untuk secara demokratis menantang partai Muslim sekuler yang berkuasa. Menyadari daya tarik Islam, partai UMNO yang berkuasa menyatakan Malaysia menjadi negara Islam pada tahun 2001 untuk memberikan dirinya legitimasi keagamaan di hadapan pemilih, meskipun konstitusi Malaysia mengakui negaranya juga sekuler. *Ikhwanul Muslimin*, sebuah organisasi yang terdiri dari ulama Islam, menggantikan tatanan

³⁹. Lily Zubaidah Rahim, "Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State," (Perth: Asia Research Centre Working Paper, 2009).

⁴⁰. Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner, *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies* (London; New York: Routledge, 2010), hlm. 9-103.

⁴¹. Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, (Stanford, California: Stanford University Press, 2003).

Mesir sekuler dengan keutamaan hukum Islam dan keyakinan prioritas mereka sejak didirikan pada tahun 1928. Contoh-contoh ini menyoroti sifat genting hubungan antara komunitas Muslim dan negara-negara sekuler .

Masalah kedua adalah hal yang praktis ; karena Muslim menuntut hak agama di Singapura, hampir tak terelakkan bahwa tuntutan mereka akan membawa mereka menjelajah ke arena politik. Ketika sebuah komunitas Muslim meminta hak untuk memakai jilbab bagi siswi di sekolah-sekolah nasional atau dalam kelompok berseragam, misalnya, sangat mungkin bahwa mereka harus masuk ke ranah politik untuk melakukannya, baik melalui pejabat terpilih melalui badan legislatif atau kelompok masyarakat sipil Muslim yang menekan pemerintah. Hal ini tidak mungkin ditoleransi dalam pemerintahan otoriter. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal yang sekuler, seperti Perancis, tindakan menutupi wajah dengan *niqab* (cadar) dianggap melawan nilai-nilai Perancis dan tidak diperbolehkan. Hal ini karena sebagaimana pendapat Ibrahim Abraham, identitas sekuler nasional ditantang oleh keinginan untuk memakai hijab.⁴²

Kecenderungan otoriter pemerintah *People Action Party* (PAP) Singapura terdokumentasi dengan baik dan sama seperti negara yang terang-terangan sekuler, telah dikenal merampas ke ruang publik. Konsentrasi Marxis' adalah contoh utama; negara menangkap beberapa anggota Gereja Katolik di tahun 1987-1988 karena diduga terlibat dalam rencana menggulingkan negara, meskipun sampai hari ini tidak ada bukti konkret yang ditunjukkan. Kebijakan tidak boleh bertudung/jilbab yang dibuat pemerintah telah ditegakkan sejak kemerdekaan dan meskipun ada tekanan di awal tahun 2000-an untuk membatalkan ini, pemerintah PAP tetap kuat bertahan. Pimpinan Pemerintah PAP membela keras dengan menyatakan bahwa membiarkan jilbab dikenakan akan menyebabkan lemahnya identitas nasional karena akan menghambat integrasi sosial. Konsisten dengan kecenderungan otoriter mereka, para pemimpin PAP senior menghukum empat orang tua yang membangkang yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah nasional dengan mengenakan jilbab. Ketika Asosiasi Profesional Muslim (AMP) dibentuk dan mulai memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin alternatif bagi Anggota Parlemen Muslim PAP yang akan mengejar hak-hak komunitas Muslim, Goh mencaci mereka bahwa tindakan mereka hanya akan melemahkan kepemimpinan Melayu PAP dan masyarakat dalam waktu yang panjang.⁴³ Respon Goh terhadap AMP adalah manifestasi dari dilema yang muncul pada masyarakat Muslim dan masih relevan saat ini; bagaimana mereka dapat mengartikulasikan tuntutan mereka dan mengejar hak-hak mereka tanpa dituduh melanggar di ruang politik dan karenanya, melanggar kebijakan sekuler suci Singapura? Dilema ini jelas menimbulkan area konflik yang mungkin antara Muslim dan negara sekuler .

⁴² . Ibrahim Abraham, "Hijab in an Age of Fear: Security, Secularism and Human Rights," *Australian Religious Studies Review*, 19 (2006): 170.

⁴³. Hussin Mutalib, "Constructing a Constructive Opposition," dalam *Impressions of the Goh Chok Tong Years in Singapore*, eds. Bridget Welsh, James Chin, Arun Mahizhnan and Tan Tarn How (Singapore: NUS Press, 2009), hlm. 68.

E. Profil Negara Singapura

Dulu Singapura adalah kampung nelayan yang didiami hanya oleh suku Melayu. Sekarang Singapura telah menjadi negara kota yang kecil, seluas 692.7 km², “terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia)”. Penduduknya berjumlah 5.321.400 jiwa, yang terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Dari jumlah tersebut, ternyata sekitar 42 persen lebih penduduknya adalah warga negara asing yang berasal dari negara seperti Malaysia, Cina, Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah dan lain-lain. Jumlah Muslim mencapai 15% dari seluruh jumlah penduduk. Mayoritas Muslim adalah etnis Melayu, sisanya adalah Muslim yang berasal dari Pakistan, India, dan Arab.⁴⁴

Singapura adalah salah satu negara yang terpadat di dunia. Skitar 85% dari warganya menghuni *apartemen* yang dibangun oleh Dewan Pengembangan Perumahan (HDB). Negara ini memiliki empat bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang lebih bersifat simbolis; dimana dipakai sebagai bahasa lagu kebangsaan (Majulah Singapura) dan juga dipakai pada saat latihan dan prosesi barisan pasukan polisi dan tentera. Pemerintah lebih cenderung berbahasa Inggris sementara itu hanya etnis Melayu yang berbahasa Melayu.

Mengingat Singapura adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris, Konstitusinya berdasarkan pada sistem Westminster. Negara ini menerapkan sistem Republik Parlementer sebagai sistem pemerintahan. Secara politik, “Singapura dipimpin oleh seorang presiden namun dalam implementasi kekuasaannya, Perdana Menteri yang berperan, sehingga presiden hanyalah simbol nuansa politik yang dijalankan oleh praktik kekuasaan otoriter”.⁴⁵ Perdana menteri adalah ketua partai politik yang merupakan kelompok mayoritas di parlemen. Pemerintah PAP menurut berbagai kalangan menerapkan undang-undang yang tidak memberi peluang bagi partai-partai oposisi yang efektif untuk tumbuh. Gaya pemerintahannya dinilai lebih cenderung bersifat otoriter dari pada demokratis yang sebenarnya.⁴⁶ Namun demikian, dengan gaya kepemimpinan itu, Singapura berhasil menjadi negara yang maju, bebas dari tindakan korupsi dan mempunyai pasar ekonomi terbuka.⁴⁷

Islam pada Awal Sejarah Singapura

Singapura telah ditempati sejak masa pra sejarah. Singapura menjadi kota pelabuhan sejak tahun 1100-an, dan menjadi pusat perdagangan sejak tahun 1200-

⁴⁴. Singapore Department of Statistics, *Singapore in Figures 2013*, hlm. 1

⁴⁵. Human Rights Watch (HWR) Country Report mengkategorikan Singapura sebagai negara otoriter yang mengekang kebebasan berekspresi dan berkumpul, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas politik individu, Adanya Akta Keamanan Internal dan Hukum Kriminal yang memungkinkan penahanan terhadap tersangka tanpa proses pengadilan. Lihat *Human Rights Watch (HWR) Country Report*, 2009.

⁴⁶. Lily Zubaidah Rahim, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*, hlm.1.

⁴⁷. The World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2011-2012*.

1300.⁴⁸ Sebelumnya, sebagaimana disebut dalam Kitab *Negarakertagama*, ia bernama 'Temasek' atau 'Tumasik' dengan arti 'kota pantai'.⁴⁹ Sebutan Singapura diberikan oleh Sri Tan Buana yang bernama Sang Nila Utama⁵⁰ yang berlayar dan karena badai angin yang sangat kencang, ia terdampar di Tumasik. Di sana, (Tumasik), ia menemukan seekor binatang aneh seperti singa. Ia meyakini sebagai pertanda baik, sehingga ia dan rombongannya memutuskan membangun wilayah baru dan menetap disana. Ia kemudian memberi nama wilayah itu dengan 'Singapura'. Istilah ini berasal dari bahasa Sansakerta: "Singa, berarti singa binatang buas, dan pura berarti kota. Dengan demikian, Singapura berarti kota Singa". Namun studi ilmiah menunjukkan bahwa populasi singa tidak pernah menghuni daratan Singapura. Diduga, yang sebenarnya terlihat oleh Sang Nila Utama adalah Harimau.

Sejarah kedatangan Islam di Singapura tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang terjadi di Nusantara dan Semenanjung Malaysia dan Kepulauan Melayu seluruhnya pada abad ke -12M.⁵¹

"Pada akhir abad ke-14 wilayah Singapura menjadi wilayah bagian kekuasaan Malaka. Hal ini berawal ketika Singapura dikuasai oleh Raja Parameswara. Penguasa baru Tumasik ini di kemudian hari diserang oleh armada Majapahit⁵², dan terdesak ke Malaka. Di wilayah yang disebut terakhir inilah Parameswara membangun kerajaan Malaka, dan banyak berhubungan dan bergaul dengan para pedagang Muslim, khususnya yang datang dari daerah-daerah di Sumatera yang beragama Islam. Hal ini pada gilirannya membuat Parameswara memeluk agama Islam, dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Demikian juga dengan para penggantinya, juga memeluk agama Islam. Pada saat itu Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan ini, bahkan dapat disebut sebagai pusat perdagangan di Asia. Di kota ini bertemu para pedagang dari tanah Arab, Gujarat, Parsi, Benggali, Pegu, Siam, negeri Cina pada satu pihak, dan pedagang dari Sumatera, Jawa, Maluku dan kepulauan kecil lainnya pada pihak lain".⁵³

Karena itu, selain berfungsi sebagai pusat dagang, Malaka juga berperan sebagai pusat dakwah Islam, sehingga melalui Malaka penyebaran Islam di Asia Tenggara mengalami kemajuan secara signifikan.

⁴⁸. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet.I, 1990), hlm. 210.

⁴⁹. "Kata Tumasik sendiri bisa jadi berasal dari nama Chiamassie yang disebut Marcopolo pada akhir abad ke-13. Boleh jadi istilah Tumasik berasal dari Tan-mashi, seperti diungkapkan saudagar Cina, Wang Tan Yuan, dipertengahan pertama abad ke-14".

⁵⁰. Menurut sejarah, "Sri Tan Buana berasal dari Bintan, yang menjadi pecahan wilayah kerajaan Sriwijaya". Lihat misalnya, Sejarah Propinsi Riau, dalam *Profil Propinsi Republik Indonesia, Riau*, (Jakarta: Yayasan Bahakti Wawasan Nusantara dan Intermasa, cet. I, 1992), hlm. 14.

⁵¹. Ezad Azraai Jamsari, " Peranan dan Sumbangan Institusi Mesjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura" dalam *Journal of Islamic and Arabic Education* 2(2), 2010 31-44, hlm. 33.

⁵². *Ibid*. Pada referensi lain dinyatakan, "Tumasik diserang oleh kerajaan Siam pada tahun 1398. Parameswara telah menyingkir sebelum Siam menyerang dan berkelana ke utara, yang akhirnya mendirikan kerajaan Islam Malaka".

⁵³. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, dari Imperium sampai Imperium*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet V, 1999), hlm. 4-5.

“Sejak abad ke-15, pedagang Muslim menjadi unsur penting dalam perniagaan wilayah Timur, tidak terkecuali Singapura. Beberapa di antara para pedagang ada yang menetap, dan menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Lama kelamaan mereka membentuk suatu komunitas tersendiri. Para pedagang ini tidak jarang merangkap menjadi guru agama dan imam. Dalam komunitas Muslim ini juga sudah terdapat sistem pendidikan agama yang bersifat tradisional. Pada umumnya mereka belajar agama di rumah-rumah, yang kemudian dilanjutkan di surau-surau dan mesjid”.⁵⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses awal islamisasi di Singapura terjadi sekitar abad 15, ketika Malaka menjadi pusat penting kekuatan Islam. Berikutnya intensitas islamisasi di Singapura juga terjadi setelah ia berada di bawah koloni Inggris.

“Pada tahun 1800-an kampung Glam dan kawasan Rocor menjadi pusat pendidikan tradisional. Dalam hal ini guru-guru dan imam mereka sangat berpengaruh, terutama dalam mempraktekkan agama dan upacara-upacara sosial keagamaan. Dengan demikian, guru-guru dan imam sangat penting peranannya dalam memupuk penghayatan keagamaan pada masyarakat Muslim Singapura. Sama dengan Muslim di kawasan Asia Tenggara lainnya, Muslim di Singapura pada masa awal menganut mazhab Syafi'i dan berfaham teologi Asy'ariyah”.⁵⁵

⁵⁴. Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 166.

⁵⁵. *Ibid.*, hlm. 166-167.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan dan metode penelitian sejarah⁵⁶ dan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sejarah mengungkapkan bagaimana dinamika, transformasi, dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan historis Islam dan masyarakat Muslim Singapura di satu sisi, dan kebijakan pemerintah di sisi lain. Dengan menggunakan studi perbandingan antara beberapa tulisan sejarah dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode sejarah, peneliti berharap dapat menggambarkan tentang cara pandang dan sikap negara/pemerintah terhadap agama Islam di Singapura; sifat dan karakteristik sekularisme yang diterapkan oleh pemerintah; dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Islam dan masyarakat Muslim dalam pengamalan Islam di negara Singapura yang sekuler.

Karena itu diperlukan gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa sebenarnya mengenai objek penelitian ini. Untuk itu, sumber-sumber tertulis seperti regulasi, kebijakan, pidato perdana menteri, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang ditulis oleh penulis sejarah yang sezaman, ditulis oleh orang yang terlibat dan atau menyaksikan peristiwa yang menjadi objek penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menganalisis teks-teks yang menjadi sumber rujukan, digunakan pendekatan *content analysis*.

Selain itu, pengumpulan dan analisis data juga menggunakan pendekatan sosiologi politik.⁵⁷ Dengan pendekatan ini akan dikumpulkan data terkait masyarakat Muslim, tingkah laku individual maupun kolektif dalam konteks sosial dan juga mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi juga adalah negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, distribusi dan alokasi dalam hubungannya dengan Islam dan masyarakat Muslim.

Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Agar tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat naratif dan konvensional –seperti yang selalu terjadi pada penulisan sejarah, penelitian ini juga berusaha menjelaskan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari peristiwa yang menjadi objek

⁵⁶. Tentang metode penelitian sejarah, lihat John Tosh, *The Pursuit of History: Aims, Methodes and Directions in the Study of Modern History* (London and New York: Longman, 1986; Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985); Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994); Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm, 89-122; dan Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).

⁵⁷. Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara, pengambilan keputusan kebijaksanaan, distribusi dan alokasi.

penelitian. Karena itu, konstruksi pembahasan cenderung menggabungkan pendekatan diakronik dan sinkronik, dalam arti bahwa peneliti tidak hanya menyelidiki dan membahas tentang proses-proses perubahan dalam setting waktu yang menghasilkan apa yang oleh Braudel disebut sebagai 'sejarah peristiwa-peristiwa' tetapi juga melihat struktur-struktur tetap tanpa memperdulikan unsur waktu (*timeless*) sehingga menghasilkan generalisasi-generalisasi yang bersifat makro.

Dalam usaha menempatkan kondisi-kondisi sinkronik dalam sebuah konteks diakronik, susunan penulisan studi ini akan didasarkan pada kronologi. Namun, untuk menghadirkan suatu pendekatan interaktif, metode kronologis ini akan dikombinasikan dengan penyusunan penulisan secara tematik

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negara Singapura

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara secara langsung dengan informan dan data sekunder berupa sumber-sumber tertulis seperti regulasi, kebijakan, pidato perdana menteri, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang ditulis oleh penulis sejarah yang sezaman, ditulis oleh orang yang terlibat dan atau menyaksikan peristiwa yang menjadi objek penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting.

3. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linear, tetapi harus menggunakan analisis interaktif (*interactive analysis*) (Sudika, 2001). Dalam metode ini, model ini disebut juga dengan model interaktif secara siklus (*syclycal interactive analysis model*). Komponen dari analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan.

Setelah seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Agar tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat naratif dan konvensional –seperti yang selalu terjadi pada penulisan sejarah, penelitian ini juga berusaha menjelaskan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari peristiwa yang menjadi objek penelitian. Karena itu, konstruksi pembahasan cenderung menggabungkan pendekatan diakronik dan sinkronik, dalam arti bahwa peneliti tidak hanya menyelidiki dan membahas tentang proses-proses perubahan dalam setting waktu yang menghasilkan apa yang oleh Braudel disebut sebagai 'sejarah peristiwa-peristiwa' tetapi juga melihat struktur-struktur tetap tanpa memperdulikan unsur waktu (*timeless*) sehingga menghasilkan generalisasi-generalisasi yang bersifat makro.

BAB IV HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI NEGARA SEKULER SINGAPURA

A. Cara Pandang dan Kebijakan Negara terhadap Islam

Dalam implementasi kenegaraan saat ini, relasi agama dan negara dapat dikategorisasikan menjadi tiga bentuk, yakni *“integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistic* (pemisahan antara agama dan negara). Dilihat dari hubungan negara dan agama--Singapura adalah negara yang memproklamirkan diri sebagai negara sekuler”.⁵⁸

Secara umum, negara sekuler berarti bahwa negara menjadi netral dalam permasalahan agama; tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama.⁵⁹ Agama menjadi urusan pribadi dan pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Namun faktanya, di Singapura, pemerintah secara implisit menunjukkan sikap dan tindakan sebaliknya. Di satu sisi, sebagai negara sekuler kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan Muslim. Namun di sisi lain menyatakan diri sebagai negara sekuler, negara Singapura memandang pengelolaan agama sebagai hal penting. Seperti ditegaskan oleh Nasir :

*“Here is a society that is very determined to be a secular state, but one that is deeply diverse in religion and ethnicity, and in order to achieve that secular goal it must manage its religious hinterland”.*⁶⁰

Pemerintah terlihat menerapkan standar ganda (*double standard*) dalam hubungannya dengan Islam. Di satu sisi pemerintah menyatakan bahwa agama adalah urusan pribadi warga negara dan “pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu”, namun faktanya pemerintah tetap mengatur dan melakukan kontrol yang ketat terhadap penyelenggaraan agama melalui badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Yang terakhir ini adalah birokrasi agama yang disponsori negara dengan status badan hukum yang memusatkan perhatian pada urusan Muslim. MUIS mengelola pengumpulan zakat, tanah wakaf, haji dan mengelola hampir 100 mesjid. MUIS juga mengelola dana pembangunan Mesjid (MBF) yang mengumpulkan sumbangan uang dari pekerja Singapura untuk membangun dan pemeliharaan mesjid di perumahan. MUIS memiliki wewenang untuk menyetujui calon komite manajemen mesjid dan menyediakan teks khutbah Jumat. Sejak tahun 1975, semua jamaah haji harus mendaftar kepada MUIS dan hanya bisa melakukan haji melalui persetujuan MUIS.

⁵⁸. Laporan Komisi Konstitusi Singapura tahun 1966. Lihat juga Kamaludeen Mohammed Nasir, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, *Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 2

⁵⁹. Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*, (Routledge, 2003), hlm.

⁶⁰. Kamaludeen Mohammed Nasir, *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 2

Selain itu, pengaturan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan agama juga dapat ditunjukkan dengan penerapan undang-undang pemeliharaan harmoni agama (MHRA), regulasi tentang hasutan dan Internal Security Act. Antara lain, regulasi ini diarahkan untuk membatasi politisasi agama dengan mencoba memisahkan agama dari politik, mengatur kegiatan keagamaan dan menahan perkembangan masyarakat sipil Muslim yang otonom.

Pemerintah Singapura menggunakan berbagai teknik untuk mengelola agama, yang meliputi penerapan hukum yang keras dalam mengelola agama, serta melakukan kooptasi baik secara formal maupun informal. Kooptasi tidak berarti hubungan tunduk atau seluruh prosesnya negatif; melainkan sebuah strategi yang sering digunakan baik oleh negara maupun badan yang kurang kuat yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, deklarasi versi Singapura tentang sekularisme nampaknya berbeda, utamanya dalam penerapannya terhadap komunitas Muslim.

Bab ini akan menjelaskan bagaimana cara pandang negara terhadap agama (Islam) dan sikap sekularistik pemerintah yang berdampak pada kebijakan-kebijakannya serta implikasinya pada masyarakat Muslim dan pada implementasi Islam. Selanjutnya juga akan disajikan tentang bagaimana kooptasi yang dilakukan pemerintah baik secara formal maupun informal, serta kebijakan multirasialisme yang berdampak pada sikap dan kebijakan pemerintah terhadap Islam

1. Larangan Azan Menggunakan *Loud Speaker*

Di Singapura, *azan* yang dimaksudkan untuk memanggil kaum Muslim untuk melaksanakan shalat, tidak boleh berkumandang secara keras menggunakan *loud speaker*, dengan alasan agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan penganut agama lain. Untuk mengetahui waktu adzan adalah dengan mendengarkan informasi dari stasiun radio yang ada. Inilah aturan yang diberlakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) –sebuah lembaga semacam MUI di Indonesia yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk urusan agama Islam.⁶¹

Namun demikian, dari 70 Mesjid di Singapura, Mesjid Sultan yang terletak di Muscat Street kampung Glam, Mesjid Al Falah di Orchard Road, serta Mesjid Abdul Gafoor di Little India, suara azan tetap berkumandang menggunakan *loud speaker* hingga dapat terdengar keluar Mesjid. Mesjid Sultan memang mendapat *privilege* dari pemerintah mengingat ia adalah Mesjid tertua di Singapura yang dibangun tahun 1924 oleh Sultan Husain. Semula, Mesjid Sultan berbentuk bangunan tradisional nusantara menggunakan atap limasan bersusun tiga seperti Mesjid Agung Demak. Kemiripan itu mengingat Mesjid Sultan didirikan oleh komunitas Jawa, Bugis dan Melayu yang menetap untuk berdagang di Singapura. Kampung Glam, tempat dimana masjid ini dibangun, dulunya adalah tempat pemukiman komunitas etnik asal Indonesia. Setelah 100 tahun kemudian, Mesjid ini direnovasi. Arsitekturnya diubah dan juga diperluas agar dapat memfasilitasi jama'ah yang

⁶¹. Helmiati, "Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekuler dan Multikultural", *Toleransi*, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2013.

lebih banyak. Sekarang, Mesjid Sultan nampak bergaya Ghotik Mughal, lengkap dengan menaranya. Ia ditetapkan sebagai monumen Nasional Singapura, karena itu diawasi secara ketat oleh negara. Sebagai monument nasional, para turis dapat menjadikannya sebagai destinasi wisata. Mesjid ini mampu menampung 5.000 orang jamaah.

2. Larangan Menggunakan Tudung Kepala (Jilbab)

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah kurang berpihak pada upaya pelaksanaan ajaran agama Islam oleh minoritas Muslim negara ini. Hal ini misalnya dapat ditunjukkan dari pelarangan memakai jilbab bagi siswi Muslim di sekolah-sekolah pemerintah, seperti ditegaskan oleh, PM, Lee Hsien Loong, kepada warga Muslim saat membuka tahun ajaran baru; *"Hijab was not part of the school uniforms and effectively banned in institutions of learning"*. Saat diwawancarai oleh Berita Harian, *Malay Newspaper*, putra Lee Kuan Yew itu kembali menegaskan bahwa "pelarangan jilbab dimaksudkan untuk memelihara integrasi dan keharmonisan sosial. Jilbab dipandang sebagai simbol agama tertentu. Mengizinkan Muslimah memakai jilbab di sekolah akan mengganggu integrasi nasional, karena akan memunculkan persoalan di kalangan siswa lainnya", dimana akan memunculkan divisi-divisi, kegusaran siswa non-Muslim dan kurangnya interaksi antar siswa yang berbeda agama. Larangan yang sama juga dulu pernah diberlakukan kepada para pegawai Muslimah saat mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintah seperti rumah sakit, klinik dan sebagainya.⁶² Kebijakan tidak boleh pakai tudung (jilbab) dalam hal ini dianalisis dalam konteks 'othering' dari komunitas Muslim.

Ketika peneliti mempertanyakan kepada responden penelitian tentang bagaimana pandangan dan sikap mereka terkait kebijakan tidak boleh bertudung/jilbab bagi siswi di sekolah pemerintah, jawaban mereka:

"Hal tersebut dimaksudkan pemerintah untuk menjaga harmonisasi dan integrasi antar pemeluk agama. Agar siswi Muslim tidak tampil eksklusif sehingga berdampak pada disintegrasi. Untuk situasi Singapura saat ini, belum memungkinkan warga Muslim untuk memohon kepada pemerintah agar siswi diperbolehkan memakai tudung/jilbab. Solusinya adalah bila ingin memakai tudung/jilbab, siswi dapat memilih untuk bersekolah di madrasah".⁶³

Yang terakhir ini, bahwa siswi dapat memilih bersekolah di madrasah juga bukan tanpa masalah. Karena faktanya, ada kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah madrasah dan siswa dengan pertimbangan terbatasnya peluang pekerjaan bagi alumni madrasah ketika mereka sudah tamat. Negara sekecil Singapura tidak memerlukan banyak guru agama, imam mesjid, dan pengelola lembaga keagamaan. bahwa negara tidak membutuhkan

⁶². "Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore", *Islam Online-net*. <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.

⁶³. Wawancara dengan Mr Mohd Yunos Mohd Syariff, Vice President II Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore

Namun demikian, menurutnya saat ini sudah dibolehkan bagi perempuan muslimah dewasa yang mengajar di sekolah atau yang bekerja di kantor-kantor pemerintah untuk menggunakan tudung saat mereka bekerja. Bahkan menurutnya saat ini ada anggota legislatif wanita yang juga memakai jilbab, dengan menunjuk pada juru bicara parlemen, Halimah Yacob. "Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap beliau baik oleh pihak pemerintah maupun parlemen hanya karena ia pakai jilbab".⁶⁴

Tudung (jilbab) telah menjadi salah satu ranah konflik yang paling diperdebatkan antara Muslim dan non-Muslim dan antar umat Islam di seluruh dunia. Masalah ini telah menjadi pusat perdebatan nasional yang memanas di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, Turki, Australia dan Singapura. Perdebatan ini –seperti juga yang terjadi di Singapura– langsung berhubungan dengan gagasan-gagasan umum terkait identitas dan nilai-nilai nasional, multikulturalisme dan pakaian yang dapat diterima di sekolah umum dan masyarakat yang lebih besar.

Sekolah secara umum dipandang sebagai tempat yang mencerminkan dan membentuk karakter bangsa, karena itu tidak jarang sekolah telah lama menjadi medan pertempuran ideologi dalam menentukan agenda pembangunan bangsa. Di negara-negara di mana mengenakan jilbab/tudung kepala di sekolah terus menjadi perdebatan, tidak hanya identitas nasional tetapi juga identitas sekuler nasional yang dianggap dipertaruhkan.⁶⁵ Misalnya, ketika politisi Partai Liberal Bronwyn Bishop dan Sophie Panopoulos mengusulkan larangan jilbab di sekolah-sekolah Australia pada tahun 2005, mantan (politisi partai itu) menyatakan bahwa memakai jilbab adalah 'tanda pembangkangan dan memperlihatkan perbedaan antara siswa Muslim dan non-Muslim' ⁶⁶.

3. Penataan Tempat Tinggal (*New Strait Settlement*)

Seperti di negara-negara sekuler lainnya, kebijakan pemerintah relatif kurang sensitif pada kebutuhan Muslim dan kurang mencermati implikasi kebijakannya pada pengamalan Islam. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah tentang penataan tempat tinggal.⁶⁷ Karena lajunya arus urbanisasi dan migrasi global di negara kecil ini, dan dalam rangka asimilasi dan integrasi antar warga yang berbeda ras dan agama, pemerintah menyediakan perumahan (*flat*) untuk rakyat, dan menjadi keharusan bagi warga Singapura, termasuk Muslim untuk tinggal di sana. Saat ini sekitar 85% warga Singapura menghuni *flat* tersebut. Pemerintah memberlakukan kuota dalam satu kompleks perumahan secara proporsional yang mencakup etnis, Cina, India, Melayu dan sebagainya. Melayu Muslim karena itu

⁶⁴. Wawancara dengan Dr. Isa Hassan, , Vice President III Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore

⁶⁵. Ibrahim Abraham, 2006 'Hijab in an Age of Fear: Security, Secularism and Human Rights', Australian Religious Studies Review, Vol.19, No.2, hlm. 170.

⁶⁶. *Ibid.*, hlm. 183

⁶⁷. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media Bandung, 2011), hlm. 212. Bandingkan dengan *former strait settlement* dalam M.B. Hooker, *Islam in South-East Asia*, (Leiden: E.J.Brill, 1988), hlm. 170.

terpaksa meninggalkan kampung tradisionalnya (Kampung Melayu) yang homogen dalam sisi etnis dan agama dan pindah ke *flat* yang bersifat modern dengan penghuninya yang multi-etnik dan multi-agama.

Kebijakan pemerintah tentang penataan tempat tinggal ini berimplikasi secara signifikan, terutama bagi Melayu-Muslim. Melayu Muslim yang sebelumnya menikmati pelaksanaan agama dalam suasana kebersamaan yang homogen, saat ini harus terpencar tinggal di sejumlah apartemen (*flat*) yang berbeda-beda. Mereka berada dalam lingkungan yang heterogen dan mesti berbaur dengan pemeluk agama dan etnis lain. Mereka yang dulu terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan dan kegiatan sosial secara kolektif, sekarang tidak lagi dapat melakukan hal tersebut. Posisi minoritas mereka di komplek perumahan (*flat*) tersebut tidak lagi mendorong terbentuknya perhimpunan keagamaan seperti saat mereka tinggal di kampung tradisionalnya yang homogen, baik dari segi etnis, budaya, bahasa maupun agama. Melayu Muslim yang terbiasa hidup dalam komunitas Muslimnya dan biasanya mengamalkan ajaran agamanya secara berjama'ah, saling menjalin *silaturrahmi*, dan saling membantu, saat ini dengan kebijakan penataan tempat tinggal tersebut, jadi terpencar dan terpisah dari jama'ah mereka yang dulunya terbentuk secara alami.⁶⁸ Implikasinya syiar Islam terasa tidak lagi sekuat dulu.

Kenyataan ini dipertegas oleh seorang budayawan Melayu, Muhammad Arif yang prihatin dengan semakin mudarnya nilai-nilai ajaran Islam dan budaya Melayu di tengah wajah kosmopolitan Singapura. Dalam makalahnya yang disampaikan pada "Simposium Jalinan Melayu Antarabangsa" di Holiday Inn Shah Alam, Muhammad Arif menuliskan:

"Oleh kerana 86% jiran di rumah pangsa terdiri dari mereka yang bukan beragama Islam, maka jarang-jaranglah orang Melayu berpeluang mengucapkan *assalamu alaikum* kepada jirannya. Mereka lebih kerap kali mengucapkan *Good morning* kepada jirannya. Kadang-kadang *chau-an* atau sekali-sekali *manekem*. Itupun hanya sekali dua mereka bersapaan dalam sehari, ketika kebetulan mereka bertemu di dalam lif atau masa hendak pergi atau pulang kerja".

Lebih jauh, menarik untuk dikemukakan di sini analisis Lily Zubaidah Rahim, bahwa pemerintah menggunakan berbagai strategi dalam rangka mengurangi "sumber kuasa politik Melayu". Kebijakan pemerintah terkait penataan tempat tinggal dipandang sebagai strategi melemahkan kekuatan dan dukungan suara Melayu. Karena dengan kebijakan ini, konsentrasi Melayu yang sebelumnya berada di satu wilayah (Kampung Melayu) menjadi terpecah dan tersebar ke apartemen/flat yang berbeda-beda sesuai dengan persentase komposisi etnis Melayu di Singapura. Sehingga konsekuensinya adalah orang Melayu tidak melebihi 22% daripada penduduk blok perumahan umum. Lily melihat kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan retorika multirasialisme untuk memastikan masyarakat Melayu yang secara tradisinya mendukung partai-partai oposisi tidak mempunyai kekuatan penentu di wilayah pilihan umum manapun, karena jumlah mereka sekarang sudah terpecah ke beberapa wilayah. Dengan demikian, ini

⁶⁸. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, hlm. 212.

menghalang Melayu untuk bertindak sebagai gerakan penting dalam menentukan hasil pemilu. Sebaliknya kebijakan ini sangat menguntungkan pemerintah yang didominasi Cina karena persentasi komposisi etnis Cina yang tinggi (74.1%). Ini berarti di setiap komplek apartemen kuota etnis Cina juga dengan jumlah persentase yang sama (74.1%). Sehingga dengan demikian, peluang untuk memenangkan pemilihan umum menjadi sangat tinggi.

4. Tidak Ada Pelajaran Agama di Sekolah

Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional, pemerintah Singapura bersikap sebaliknya. Sebagai negara sekuler dengan penduduk yang beragam etnis dan agama, pemerintah Singapura memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk suatu agama dan bahkan untuk tidak ber-agama. Karena itu, di sekolah-sekolah milik pemerintah tidak diperkenankan mengajarkan agama. Sekolah bersifat netral, dan agama menjadi urusan pribadi pemeluknya.⁶⁹ Kebijakan yang sama dilanjutkan oleh Perdana Menteri berikutnya, Lee Hsien Loong, bahwa ia tidak akan memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah. Seperti dijelaskan Perdana Menteri (PM) Lee saat menjawab pertanyaan mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan asal Sri Lanka yang meminta penjelasan tentang kabar bahwa Singapura akan mengubah sikap tentang pengajaran agama di sekolah pemerintah. Terhadap pertanyaan itu, PM Lee menjawab, “ Kami telah menetapkan bahwa Singapura adalah sebuah negara sekuler, karena itu maka agama merupakan suatu hal yang sebaiknya dibiarkan berada dalam kawasan pribadi.” Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang—meskipun bukan negara agama—menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.⁷⁰

Pelajaran agama pernah diberlakukan di sekolah-sekolah Singapura pada tahun 1984. Pemerintah pada saat yang sama juga memasukkan faham dan ajaran Confusionism (Kong Hu Cu) dalam kurikulum pendidikan nasional. Siswa berhak memilih pelajaran agama apa yang mereka pelajari sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti Buddha, Islam, Kong Hu Cu dan Kristen. Pelajaran ilmu agama untuk semua agama besar ini diperkenalkan sebagai komponen dari program pendidikan moral di sekolah pemerintah. Dengan demikian, diharapkan dapat melahirkan lulusan yang baik dan berakhlak berdasarkan nilai-nilai religius. Selain itu, pelajaran agama diyakini dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi diri dari nilai dan budaya Barat yang diyakini dapat merusak akhlak.⁷¹

Yang menarik untuk diperhatikan lebih lanjut bersamaan dengan kebijakan terkait pelajaran agama adalah kebijakan pemerintah yang menyertakan promosi ajaran Konfusianisme (Kong Hu Cu) di sekolah-sekolah dan gaya paternalistik pemerintahan otoriter PAP. Bahkan, meskipun tidak secara eksplisit, pemerintah cenderung mendukung paham dan penerapan ajaran Konghucu. Dari segi politik,

⁶⁹. Helmiati, “Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura”,

⁷⁰. Helmiati, “Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura”, *Laporan Penelitian*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014).

⁷¹. Lily Zubaidah Rahim, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2004), hlm. 204.

Konfusianisme menyediakan modal budaya dan moral untuk melegitimasi penghormatan pada penguasa. Namun, ketika menjadi jelas bahwa kebangkitan kembali agama dan dakwah sedang terjadi, dan sebagian besar siswa China memilih untuk belajar Studi Buddha dan Pengetahuan Alkitab dari pada Konfusianisme, pemerintah PAP akhirnya menarik kebijakan kewajiban mempelajari pelajaran agama di sekolah pada tahun 1990.⁷² Kala itu pemerintah berdalih bahwa pelajaran agama membuat para siswa semakin terpisah satu dengan lainnya.⁷³ Ada yang mensinyalir bahwa maksud awal pemerintah memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum nasional adalah untuk mengefektifkan sosialisasi dan pengamalan faham Confusionism. Namun faktanya daya tarik ideologi agama lain lebih kuat. Ketika terlihat jelas oleh pemerintah bahwa kebangkitan kembali agama dan dakwah sedang terjadi, dan sebagian besar siswa China memilih untuk belajar Studi Buddha dan Pengetahuan Alkitab dibanding Konfusianisme, pemerintah PAP akhirnya 'menarik steker' kewajiban mempelajari pelajaran agama pada tahun 1990. Dihadapkan pada konsekuensi yang tidak diinginkan ini, kewajiban pelajaran agama diganti dengan pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan moral. Karena itu, keberadaan pelajaran agama dalam kurikulum nasional Singapura tidak berlangsung lama. Sebagai gantinya adalah pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan moral tanpa didasari oleh agama apapun.

Namun demikian, menurut versi pemerintah, berdasarkan hasil temuan penelitian ilmiah sosial yang ditugaskannya, menemukan bahwa pelajaran agama menyebabkan revivalisme agama dan intensitas polarisasi keagamaan di kalangan siswa sehingga dapat memicu konflik antar agama. Pemerintah juga mensinyalir ada guru yang mengajari siswa untuk mengikuti agama tertentu sehingga terjadi ketegangan di sekolah. Sejak saat itu, pemerintah melarang pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Namun demikian -meski pelajaran agama di sekolah telah dihapuskan--promosi nilai-nilai Konfusianisme bertahan dengan konstruksi/pembentukan ideologi nasional atau sipil agama pada tahun 1991 yang mengacu pada 'Nilai Bersama' - berdasarkan kodifikasi lima sila yang secara kuat mengintegrasikan prinsip-prinsip Konghucu. Yang penting lagi, ideologi 'Nilai Bersama' merupakan penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal yang didasarkan pada sistem politik adversarial.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pelajaran agama dalam kurikulum nasional hanya bertahan lebih kurang 5 (lima) tahun. Berikutnya, kewajiban pelajaran agama diganti dengan pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan moral. Pendidikan moral dimaksudkan dalam rangka membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin dan perilaku sosial sehari-hari.

⁷². Lily Zubaidah Rahim, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2004), hlm. 206.

⁷³. Meskipun ada yang menduga bahwa kebijakan memasukkan pelajaran agama pada tahun 1984 ada kaitannya dengan moment kampanye dan dekatnya pemilihan umum. Terbukti setelah lima tahun kemudian, kebijakan ini dihapus kembali. Lily Zubaidah dan Yunus Ali, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, hlm. 204.

Namun demikian, bagi masyarakat Muslim pengamalan agama bukan hanya sebatas aspek moral, melainkan mencakup semua aspek kehidupan, mengingat *Islam is a way of life*. Karena itu, Islam mencakup pedoman keyakinan (*aqidah*) tata cara beribadah dan bergaul (*syari'ah*) serta sikap dan prilaku (*akhlak*). Untuk itu transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam kepada generasi muda melalui pendidikan agama Islam menjadi kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat Muslim. Untuk itu, meskipun pemerintah tidak memberikan ruang bagi pendidikan agama di sekolah, masyarakat Muslim Singapura tetap menyelenggarakannya secara swadaya melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Seperti dalam perspektif Islam, pendidikan adalah pemberian bekal dan melatih orang-orang Islam agar mampu melaksanakan tanggungjawab mereka yang bersifat umum (*duniawi*) maupun agama (*ukhrawi*).

5. Ketertinggalan Melayu Muslim dan Pencitraan

Di Singapura 99,6% Melayu adalah Muslim. Dengan demikian Melayu adalah masyarakat etnis yang paling homogen dalam hal agama. Hal ini telah menyebabkan kategori Melayu dan Muslim digunakan secara sinonim. Identitas Muslim diperlakukan sebagai bagian integral identitas Melayu. Karena itu, tidak seperti komunitas etnis lainnya di Singapura, etnis Melayu dan Islam telah digabungkan -sebuah fenomena bahkan tidak dipraktekkan di Timur Tengah di mana ada komunitas Arab Kristen yang cukup besar.

Selain dilihat dari hubungan politik negara dan agama, orang Melayu yang notabene adalah Muslim hanya menjadi masyarakat kelas dua (*the second class*) dan tertinggal di belakang (*left behind*) etnis Cina.⁷⁴ Kehidupan mereka baik ekonomi, politik, pendidikan, strata sosial, berada pada posisi sebaliknya dari apa yang dijanjikan dalam Konstitusi Singapura pasal 152 bahwa :

"Akan menjadi kebijakan yang disengaja dan disadari pemerintah Singapura sepanjang waktu untuk mengakui posisi khusus orang Melayu yang merupakan penduduk asli pulau (Singapura) dan yang paling perlu bantuan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah singapura untuk melindungi, mendukung, mengangkat dan mempromosikan pendidikan, agama, kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahasa Melayu".

Karena itu tidak heran bila, Lily Zubaidah dalam bukunya "Dilema Singapura" menilai pasal ini sebagai basa-basi. Karena, ketentuan dalam pasal tersebut bertolak belakang dengan banyak realita yang dihadapi Melayu-Muslim Singapura dan retorika pemerintah Singapura pada meritokrasi dan multirasialisme. Pasal di atas memunculkan sejumlah pertanyaan : Mengapa komunitas etnis tertentu diberikan hak-hak istimewa atas orang lain? Dan mengingat bagaimana asal-usul dari Singapura sebagai bangsa didirikan pada prinsip-prinsip kesempatan yang sama tanpa memandang ras, tidak kah program advokasi afirmatif pada orang Melayu bertentangan dengan cita-cita seperti itu? Pertanyaan ini cukup menggelitik, mengingat kebijakan pemerintah terkait multirasialisme dan

⁷⁴. Suriani Suratman, "Problematic Singapore Malays"-The Making of Potrayal, Makalah Simposium Internasional tentang "Thinking Malayness", Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ICCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 19-21 Juni 2004.

multikulturalisme. Pada kenyataannya, kondisi Melayu baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan tertinggal dibanding etnis lain.

Posisi Melayu/Muslim sebagai orang kelas dua dan komunitas yang tertinggal dapat dijumpai dari sejumlah catatan dan studi yang dilakukan. Di tahun 1960-an, Melayu Muslim digambarkan sebagai orang yang tertinggal (*lagging behind*) dibanding etnis lain serta lamban dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Seperti pernah disampaikan oleh PM Lee, bahwa orang Melayu yang nota bene Muslim tertinggal dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan perumahan.⁷⁵ Tahun 1970-an, Melayu Muslim digambarkan masih belum mengalami banyak perubahan. Mereka masih dipandang sebagai kelompok yang tertinggal baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial.⁷⁶ Sebaliknya etnis Cina cenderung memiliki prestasi yang lebih baik di bidang pendidikan. Di tahun 1980-an meski Singapura mengalami perluasan ekspansi pendidikan dan peluang ekonomi, Melayu Muslim masih tetap digambarkan sebagai orang yang tertinggal di dua bidang ini, yaitu pendidikan dan ekonomi. Seperti disinyalir oleh seorang anggota parlemen, Mr. Ow Chin Hock, *"More effort should be made to improve the educational levels of Malay students as statistics show that the number of Malays with secondary and tertiary education was lower than national averages"*. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Dr. Ahmat Mattar, president Mendaki: *"We are still a long, long way from our target... We must intensify our efforts to achieve greater results"*.⁷⁷ Pada tahun 1990-an, sebagaimana digambarkan oleh pemerintah, bangsa Melayu telah mengalami perkembangan dan membuat capaian selama 30 tahun terakhir, namun masih belum memuaskan dan sejajar dengan bangsa lain.⁷⁸ Sementara di tahun 2000-an gambaran tentang Melayu sudah mengalami perubahan yang signifikan. Melayu digambarkan telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun demikian mereka dipandang kurang loyal dan mengambil jarak dengan warga negara lainnya.

Dalam bidang politik, meskipun 13.4% penduduk Singapura terdiri dari masyarakat Melayu dan merupakan etnis kedua terbesar, tetapi jumlah perwakilan masyarakat Melayu di Parlimen Singapura tergolong lemah. "Dari tahun 1960 hingga 1991 jumlah perwakilan anggota parlemen Melayu di parlemen tidak pernah lebih daripada 10 orang, walaupun jumlah anggota parlemen meningkat dari 50 orang pada tahun 1960 menjadi 81 orang pada tahun 1991. Kesimpulannya, persentase anggota parlemen Melayu di parlemen semakin menurun yaitu dari 20% pada tahun 1960 menjadi 9.8% pada tahun 1991".

Pada tahun 2001, PM Goh Chok Tong kembali menegaskan bahwa Melayu Singapura telah membuat progres yang signifikan dan menunjukkan data statistik tentang pencapaian Melayu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kualitas hidup sepanjang sepuluh tahun terakhir. Hal ini ditegaskan Goh Cok Tong seiring dengan ketertarikan Media Malaysia terhadap isu marjinalisasi Melayu di

⁷⁵. Suriani Suratman, *"Problematic Singapore Malays"-The Making of Potrayal*, Makalah Simposium Internasional tentang "Thinking Malayness", Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ICCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 19-21 Juni 2004. hlm. 3.

⁷⁶. Sharom Ahmat & James Wong (ed.), *Malay Participaton in the National Development of Singapore*, (Singapore: Central Council of Malay Cultural Organisations Singapore, 1971), hlm. 1

⁷⁷. Dalam Suriani Suratman, *Problematic Singapore Malays: The Making of Potrayal*, hlm. 10.

⁷⁸. *Ibid.*, hlm. 14.

Singapura ⁷⁹ Untuk membantah lebih jauh tuduhan media Malaysia tentang marjinalisasi Melayu Singapura, Goh membandingkan dengan menunjukkan data statistik bahwa Melayu Singapura jauh lebih baik dari Melayu Malaysia. Namun demikian, meski Melayu sudah tidak lagi dipandang sebagai orang yang tertinggal (*lagging behind*), pada era yang sama muncul pencitraan bahwa orang Melayu kurang mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan yang lain. Pencitraan ini semakin kuat seiring dengan tertangkapnya 15 orang *Jema'ah Islamiyah* yang terlibat dalam kegiatan terorisme pada bulan Desember 2001.⁸⁰ Peristiwa ini semakin mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ketat untuk menjaga relasi dan integrasi antar etnis/ras. Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pada saat diminta penilaiannya mengenai perkembangan multikulturalisme di Singapura di tahun 2011, mengatakan:

*"I have to speak candidly to be of value, but I do not wish to offend the Muslim community...I think we were progressing very nicely until the surge of Islam came, and if you asked me for my observations, the other communities have easier integration – friends, intermarriages and so on, Indians with Chinese, Chinese with Indians – than Muslims. That's the result of the surge from the Arab states....I would say today, we can integrate all religions and races except Islam...I think the Muslims socially do not cause any trouble, but they are distinct and separate."*⁸¹

"Saya harus berbicara dengan jujur dan terbuka untuk dinilai, tetapi saya tidak ingin menyerang komunitas Muslim. Saya pikir kita mendapatkan kemajuan yang sangat baik hingga gelombang Islam datang, dan jika anda menanyakan mengenai observasi saya, komunitas-komunitas lainnya jauh lebih mudah untuk berintegrasi - antar teman, pernikahan dengan latar belakang yang berbeda, India dengan Cina, Cina dengan India. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Muslim. Inilah hasil dari gelombang yang muncul dari negara-negara Arab." Kemudian ia menambahkan : "Hari ini kita bisa mengintegrasikan semua agama dan ras kecuali Islam". Ia juga mengatakan: "Saya pikir umumnya orang-orang Muslim secara sosial tidak menyebabkan timbulnya masalah, tetapi mereka berbeda dan terpisah".

Mr Lee lebih lauh lagi mengatakan bagaimana generasi para politisi pada masa dia, yang bekerja dengannya, telah berintegrasi dengan baik termasuk duduk bersama dan makan bersama. Ia katakan: "Anda pergi ke sekolah dengan orang Melayu dan Cina, maka akan anda temukan segmen halal dan non-halal, demikian juga dengan universitas-universitas. Dan mereka cenderung duduk secara terpisah supaya tidak terkontaminasi. Semuanya menjadi terpisah secara sosial. Ia menambahkan bahwa hasilnya adalah sebuah "kerudung" yang menyelubungi orang-orang. Tanyakan apa yang orang-orang Muslim Singapura butuhkan untuk melakukan integrasi, ia menjawab: "Jangan terlalu kaku menjalankan aturan-aturan Islam dan katakan, Okay, aku akan makan bersamu." Uraian di atas memperlihatkan cara pandang sangat sederhana pemerintah dalam memandang

⁷⁹. " Singapore Malays Have Made Significant Progress " *The Straits Times*, 22 January 2001.

⁸⁰. 15 Nabbed Here for Terror Plans, *The Straits Times*, 6 January 2002.

⁸¹. *The Straits Times*, 26 January 2011. Lihat juga Lee Kuan Yew: *Hard Truths to Keep Singapore Going*.

ideologi dan keyakinan Muslim pada Islam yang diukur dengan cara pandang personalnya. Sikap Muslim yang waspada pada makanan haram dipandang sebagai sikap kaku.

Uraian-uraian di atas lebih jauh juga memperlihatkan bagaimana posisi Melayu/Muslim dalam perjalanan sejarahnya yang digambarkan sebagai orang yang terbelakang dan orang yang loyalitasnya terhadap negara masih diragukan, sehingga patut dicurigai. Selain itu, pemerintah juga menggambarkan orang Melayu sebagai “bangsa yang mudah berpuas hati, malas, tidak ambil peduli, suka bersenang, tidak ada motivasi dan tidak ada disiplin”.⁸²

Pencitraan bahwa Melayu tertinggal dibahasakan oleh Alfian sebagai internalisasi teori defisit budaya (di mana 'keterbelakangan' dari kelompok etnis tertentu disebabkan oleh budaya mereka, atau bahkan pada warisan genetiknya). Inseminasi ideologi tersebut ke dalam jiwa Singapura dinilainya memperlihatkan cacat tertentu dalam proyek multikultural Singapura, dalam upaya untuk homogenisasi pengalaman leluhur untuk menciptakan ilusi 'kesetaraan. Selain itu, ia menilai sikap tersebut sebagai kebingungan pemerintah dengan perbedaan kelas. Namun kemudian menjadikan hal tersebut sebagai isu dan senjata untuk pengaturan program tertentu seperti sistem penetapan kuota perumahan, yang berfungsi untuk mengikis pengaruh pemilu.⁸³ Pada intinya, dilema Singapura, begitu menurut Alfian, adalah tentang permainan kekuasaan, sehingga Melayu tidak memperoleh hak seperti yang dijanjikan Konstitusi bagi Melayu.

Hal yang tidak kalah menarik untuk di singgung dalam konteks ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lily Zubaidah Rahim, yang menguraikan posisi Melayu dan Islam serta kaitan antara Melayu dan Islam. Pemerintah dengan berbagai cara berupaya membuat pemisahan antara Melayu dan Islam. Studi ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu termarginalisasi dalam aspek sosio-ekonomi, pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan, sebagaimana kuota penduduk etnis di kawasan perumahan, pelajar Melayu di setiap sekolah sejak tahun 1988 dicadangkan supaya tidak melebihi 25% dari jumlah pelajar etnis lain. Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah pelajar Melayu di sekolah tertentu dengan alasan menjaga kualitas / mutu dan prestasi akademi pelajar dan sekolah. Kebijakan yang memandang rendah pada kemampuan siswa Melayu ini tidak berdasarkan pada kajian ilmiah yang terperinci sehingga pelaksanaan dasar kuota tersebut dpat dianggap sesuatu yang wajar.⁸⁴

Selain tentang pendidikan, penulis juga membuat perbandingan antara bidang pekerjaan Melayu dan Cina sejak tahun 1957 sampai 1980. Ia juga menjelaskan tentang strategi pemerintah membangun kekuasaan dan mempertahankan hegemoni ideologinya. Ini semua menunjukkan betapa pasal 152 Konstitusi Singapura belum terealisasi sebagaimana seharusnya.

⁸² . Lily Zubaidah Rahim, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2004).

⁸³. Resensi Buku Lily Zubaidah Rahim, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2004, oleh Alfian.

⁸⁴. Lily Zubaidah Rahim, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*.

B. Kebijakan Multikultural

Sesuai dengan ideologi sekularisme yang dianut oleh pemerintah, agama tidaklah menjadi perhatian utama pemerintah Singapura. Mengapa kemudian terlihat ada beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan tidak pro-Islam, menurut Mohd Yunos:

“lebih disebabkan oleh kebijakan multirasikulturalisme yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan harmoni antar warga negara yang musti ras dan multi etnik, bukan karena masalah agama itu sendiri atau karena keyakinannya terhadap agama tertentu dan cenderung mengabaikan agama lain”.⁸⁵

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dr. Syaifuddin:

“Sesungguhnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap pemeluk agama manapun. Kesan sikap tidak mendukung pemerintah terhadap ajaran/ kegiatan agama tertentu bukan karena agama itu sendiri tetapi lebih pada kebijakan multirasialisme / multikulturalismenya yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan asimilasi antar warga. Seperti larangan menggunakan tudung bagi siswa Muslim, lebih karena menjaga integrasi nasional dan menghindari munculnya divisi-divisi di kalangan siswa. Begitu juga kebijakan pemerintah terkait penataan tempat tinggal, selain dimaksudkan untuk penataan kota juga dimaksudkan untuk menjaga agar terjadi integrasi dan asimilasi antar agama dan etnis yang berbeda. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud stabilitas sosial. Selain itu batasan-batasan tertentu atau penyesuaian tidak hanya dikenakan pada Melayu/pemeluk Islam, tetapi juga kepada etnis /pemeluk agama lainnya. Penganut ajaran Taoist juga tidak dibolehkan membakar colok saat menyambut perayaan di tempat-tempat terbuka. Jumlah dan ukuran colok dikurangi dan aktivitas membakar colok hanya di dibolehkan di *tokong*”.⁸⁶

Singapura memang telah dikenal di seluruh dunia sebagai negara multiras yang kuat. Sejak meraih kemerdekaan, elit politik yang berkuasa telah menerapkan kebijakan multikulturalisme/multirasialisme. Multirasialisme menurut definisi Benjamin, adalah "ideologi yang memberikan status yang sama pada budaya dan berbagai identitas dari berbagai 'ras' yang terdiri dari masyarakat majemuk".⁸⁷

Kebijakan multirasialisme ini seperti dikemukakan oleh Dr. Isa Hassan:

⁸⁵.Wawancara dengan Mr Mohd Yunos Mohd Syariff, Vice President II Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore.

⁸⁶. Wawancara dengan Dr. Syaifuddin, dosen pada program Diploma *Muhammadiyah Association Singapura*, pada tanggal 11 November 2015 bertempat di kampusnya, Lorong 14 Geylang Singapore.

⁸⁷. Benjamin, 1976), hlm. 67

“...berawal dari ketegangan antar ras yang terjadi di awal sejarah negara Singapura pada tahun 1950-an dan 1960-an. Persaingan dan kerusuhan ras sebelumnya, membuat para pemimpin Singapura pada waktu itu prihatin terhadap stabilitas politik sebagai bangsa. Karena itu, pemerintah mengadopsi kebijakan yang memberikan pijakan dan status yang sama untuk setiap warga Singapura. Niat awal pemerintah yang paling urgent terkait multirasialisme adalah guna menghilangkan disparitas antar etnis dan kekerasan, sebaliknya menginginkan adanya kohesi sosial dalam masyarakat meskipun berbeda ras. Pemerintah ingin agar orang-orang dengan ras yang berbeda berinteraksi secara sosial dan terkait satu sama lain. Multirasialisme dimaksudkan sebagai kontrol sosial untuk menangkal ketidaknyamanan antar ras dan pemerintah, dengan menerapkan perlakuan yang adil dan sama pada semua pihak. Oleh karena itu tidak akan ada alasan untuk terjadi perselisihan atau ketegangan antara ras. Kebijakan multirasialisme diperkenalkan pemerintah untuk meringankan setiap ketegangan ras dan kesenjangan yang terjadi.⁸⁸

Dari uraian di atas terlihat sikap negara Singapura yang begitu berhati-hati dan waspada dalam menjaga keharmonisan antar etnis dan agama. Hal ini antara lain karena pasca kolonial, penduduk Singapura hanyalah imigran yang berasal dari beragam ras, yang dibawa oleh Inggris tanpa rasa keterikatan wilayah dan tanah air. Imigran dengan asal yang berbeda-beda tidak terasosiasi secara erat satu sama lain. Ide multirasialisme menegaskan identitas setiap orang di Singapura, dan mempromosikan ide bahwa meskipun di Singapura ada ras dan budaya yang beragam, semua dapat hidup berdampingan secara harmonis.⁸⁹ Selain itu, kebijakan multirasialisme juga karena keberadaan dan kondisi Singapura sebagai sebuah negara kecil yang diapit oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim di Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Pengalaman relatif singkat Singapura terkait konflik agama yang bersifat rasial pada tahun 1950-an dan kerusuhan etnis tahun 1964 yang menyebabkan empat orang tewas dan delapan puluh orang luka-luka, menempati status ikonik dalam sejarah Singapura.

‘Konflik agama’ di tahun 1950-an dan 1960-an tersebut telah disorot oleh pemerintah PAP bahkan untuk membenarkan kebijakan administratif dan hukum yang kejam atas nama kepentingan nasional, ketertiban dan stabilitas sosial. Misalnya, kerusuhan Maria Hertogh pada 11-13 Desember 1950 telah menjadi sebuah ikon dari karakterisasi negara Singapura karena rentan terhadap destabilisasi di sepanjang garis agama dan etnis. Menurut narasi resmi, kerusuhan Hertogh, yang menyebabkan 18 orang tewas dan 173 luka-luka, dipicu oleh sengketa hak asuh atas seorang gadis keturunan Belanda bernama Maria Hertogh yang dibesarkan oleh keluarga Muslim Melayu selama pendudukan Jepang dan menikah sesuai hukum Syariah Islam. Namun, agama hanya satu dari berbagai faktor yang berkontribusi pada kerusuhan tersebut. Studi yang dilakukan oleh Aljunied menunjukkan bahwa kerusuhan itu sangat didorong oleh keluhan berbagai komunitas Muslim yang dipandang rendah oleh pemerintah kolonial, pengaruh ide-

⁸⁸ . Wawancara dengan Dr. Isa Hassan, Vice President III Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore.

⁸⁹. Multiculturalism of Singapore, hlm.2.

ide radikal, efek marginalisasi sosio ekonomi, sensasionalisasi pers dan ketidakefektifan badan pembuat kebijakan dan badan-badan keamanan kolonial lainnya. Namun, oleh pemerintah peristiwa ini dijadikan sebagai dasar argumen mengawal secara ketat pelaksanaan kebijakan multikulturalismenya dan menjaga harmonisasi antar agama dan etnis.

Pada tahun 1964, sebuah pertempuran selama prosesi memperingati maulid Nabi Muhammad memicu kerusuhan yang menewaskan 33 orang dan 600 luka-luka. Seperti kerusuhan Hertogh, kerusuhan 1964 tidak berbasis agama tapi sangat didorong oleh pertengkaran politik antara PAP dan kepemimpinan aliansi dalam kontes mendapatkan dukungan elektoral Melayu. Ketegangan politik ini diperparah lagi oleh provokator agen Indonesia yang berbasis di Singapura dan peradangan jurnalisme.

Kedua peristiwa kerusuhan ini menjadi peristiwa ikonik dalam sejarah Singapura dan dijadikan dasar argumentasi bagi sikap kewaspadaan dan kehati-hatian pemerintah dalam menangani keragaman etnis dan agama.

Hal ini nampaknya sangat penting bagi negara-negara dengan populasi multi-agama dan multi-etnis. Karena potensi volatilitas yang melekat dalam agama, negara secara konsisten berusaha untuk mengatur agama untuk menjaga ketertiban sosial. Negara Singapura tidak berbeda; sebagai negara yang terdiri dari warga negara yang multi-etnis dan multi-agama, pemerintah PAP sungguh-sungguh mengadopsi sekularisme sebagai strategi untuk menjamin stabilitas sosial yang menjadi modal dan dasar bagi kelangsungan hegemoninya.

Multirasialisme tidak hanya berfungsi untuk mengenali perbedaan-perbedaan rakyat yang berbeda ras tetapi bahkan memeliharanya. Negara berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya yang unik untuk setiap ras, serta memberi mereka rasa identitas (*sense of identity*). Orang-orang dengan ras dan etnis berbeda di Singapura semua diklasifikasikan dengan istilah yang disebut dengan skema "CMIO" (Cina, Melayu, India, Lainnya). Dengan skema ini, setiap warga negara di Singapore dikategorikan sebagai salah satu dari empat ras tersebut. Setiap individu di Singapura mengidentifikasi dirinya sebagai Cina, Melayu, India atau Lainnya. Salah satu contoh bukti hal ini adalah penyebutan ras setiap warga Singapura pada kartu identitas /Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, negara menegaskan bahwa setiap ras tertentu memiliki bahasa ras mereka sendiri. Cina berbahasa Mandarin; Melayu = bahasa Melayu, India = Tamil) dan agama ras (Cina = Buddha, Melayu = Islam, India = Hindu). Untuk pernikahan antar ras, mereka ditentukan berdasarkan ras ayahnya oleh hukum.⁹⁰ Tentu saja, pembatasan warga negara menjadi hanya menjadi empat ras menjadi penyederhanaan. Keluarga dengan pernikahan antar ras dapat mengalami problem terkait kategorisasi ini. Salah satu dari problem tersebut tercermin dalam diskusi tentang sistem pendidikan yang diikutinya. Sehubungan dengan skema ini, Singapura telah mengadopsi kebijakan bilingual untuk sistem pendidikan. Setiap siswa di sekolah perlu belajar bahasa Inggris dan "ditugaskan" untuk belajar bahasa ibu mereka, yang adalah bahasa ras siswa bersangkutan. Dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus dimana bahasa ibu menjadi sesuatu yang bisa dipilih, bukannya ditentukan

⁹⁰. Chua, 2003), hlm. 61.

berdasarkan identitas. Pilihan bahasa terkadang menjadi satu strategi atau terkait kepentingan ekonomi. Untuk beberapa ras, diyakini bahwa belajar Mandarin secara ekonomis lebih menguntungkan bagi anak mereka karena Singapura didominasi Cina⁹¹

Kekuatan pendorong utama di balik multikulturalisme adalah meritokrasi dan kesetaraan, yang berusaha memperkuat setiap konstituen ras "CMIO" yang memiliki identitas yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan di atas, kebijakan multikulturalisme ini terkait erat dengan realitas masyarakat Singapura yang majemuk (plural), karena multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.

Singapura nampaknya lebih menggunakan model multikulturalisme yang meengedepankan nasionalitas. Dengan demikian, untuk konteks Singapura, nampaknya kebijakan multirasial di beberapa bagian, telah mencapai tujuan utamanya, terutama dalam meningkatkan kohesi sosial. Sementara di sisi lain, juga membawa beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kritik dan konsekuensi yang bersifat umum seperti yang disampaikan di atas.

C. Kooptasi dalam Rangka Mengelola Agama

Manajemen agama menjadi perhatian penting bagi negara manapun yang mengaku menjadi sekuler. Hal ini sangat penting di negara-negara dengan populasi multi-agama dan multi-etnis. Karena potensi kecenderungan volatilitas (berubah) yang melekat dalam agama, negara secara konsisten berusaha untuk mengatur agama untuk menjaga ketertiban dan menjamin stabilitas sosial. Negara Singapura – dalam hal ini– tidak berbeda.

Negara Singapura memiliki kepentingan dalam mengelola agama, Islam khususnya, terutama mengingat pengalaman pahit sejarahnya yang pernah berhadapan dengan konflik antar etnis. Selain itu, juga mengingat tumbuhnya ekstremisme Muslim di beberapa negara. Hal ini menjadi ancaman bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan menjamin stabilitas sosial, mengingat tatanan sosial adalah landasan legitimasi dan hegemoni pemerintah PAP.

Kewaspadaan yang tinggi dilakukan ketika berhadapan dengan Islam karena berbagai alasan. *Pertama*, karena sistem kepercayaannya yang luas (komprehensif), Islam dipandang berpotensi untuk digunakan sebagai titik kumpul terhadap beberapa kebijakan negara. *Kedua*, pemerintah benar-benar percaya bahwa peningkatan religiusitas Muslim berhubungan langsung dengan peningkatan aktivitas teroris.⁹² Karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur / mengelola agama. Ada beberapa strategi yang digunakan pemerintah Singapura dalam mengelola agama. Satu diantaranya adalah dengan mengkooptasi (memilih) badan dan organisasi keagamaan baik secara formal maupun informal dalam mencapai

⁹¹. *Ibid.* hlm. 61.

⁹². Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore : A Study of MUIS and Pergas*, (Thesis for the Degree of Master of Social Sciences, Departement of Social Sciences, National University of Singapore, 2012), hlm.

tujuan pembangunan bangsa. Peka terhadap kekuatan agama untuk memobilisasi dan memotivasi, pemerintah PAP secara selektif mengkooptasi dan memanfaatkan potensi agama untuk membantu memainkan peran pemerintah dalam mengelola agama, sehingga tidak terlihat pemerintah mengelola agama secara langsung. Dalam proses kooptasi, ada badan atau organisasi yang dikooptasi. Dengan kata lain, badan atau organisasi yang dipilih membiarkan diri mereka dikooptasi/dipilih.

Ada banyak definisi tentang kooptasi dalam literatur, dan mengejutkan, sebagian besar disertai dengan penilaian normatif yang sebagian besar negatif. Untuk menjadi 'terkooptasi', seperti yang umum dipahami, berarti 'jual jiwamu' kepada pihak berwenang. Pemahaman umum kooptasi ini mungkin berasal dari istilah yang digunakan dalam kritik Marxis terhadap negara. Marxis atau penulis yang berhaluan kiri seperti Gramsci dan Therborn telah menggunakan istilah ini, biasanya untuk menunjukkan strategi negara untuk mensubordinasi massa. Namun demikian, untuk keperluan penelitian ini, 'kooptasi' akan didefinisikan sebagai proses tujuan (atau hasil) dari negara yang bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi keagamaan secara harmonis, tanpa ada penilaian sinis tentang apakah itu 'baik' atau 'buruk' dalam arti moral. Dengan demikian, kooptasi tidak berarti hubungan tunduk atau seluruh prosesnya negatif; melainkan hanyalah strategi yang sering digunakan baik oleh negara maupun badan yang kurang kuat yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekali lagi, baik negara maupun lembaga yang dikooptasi sama-sama berupaya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Karena itu, hubungan antara organisasi keagamaan tersebut dan negara bersifat simbiosis mutualisme.

Terkait dengan kooptasi, hasil studi yang dilakukan oleh Walid Jumblatt Abdullah menyebutkan ada dua strategi yang digunakan negara dalam kerangka sekularismenya. Pertama, apa yang dibahasakan oleh Abdullah dengan sekularisme otot (*mascular secularism*) dimana hukum dan kooptasi secara resmi digunakan. Sekularisme otot mengacu langsung pada intervensi negara. Pendekatan ini ditandai dengan penerapan undang-undang yang kejam, regulasi yang mengawal secara ketat pelaksanaan agama dan kooptasi formal seperti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap MUIS. Kedua, Sekularisme Dikalibrasi yaitu lebih merupakan bentuk intervensi tidak langsung yang terdiri dari hubungan simbiosis antara organisasi keagamaan yang bersangkutan dan negara. Selain itu juga dengan melakukan kooptasi informal seperti yang diperlakukan oleh negara kepada Pergas. Boleh jadi ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan membiarkan diri mereka terkooptasi, sehingga secara kritis menekankan peran lembaga dan sifat non-pasif aktor yang terlibat. Dua pendekatan ini telah bekerja bersama-sama menjamin stabilitas sosial, dan karenanya mempertahankan hegemoni PAP, karena tatanan sosial adalah landasan legitimasi PAP.

Organisasi yang setuju untuk dikooptasi sering melakukannya dengan tujuan akhir yang lebih besar, dan mereka menggunakan posisi mereka vis-à-vis negara juga untuk keuntungan mereka sendiri. Tambahan lagi, kooptasi juga harus dilihat tidak hanya sebagai mekanisme formal, dimana negara menggunakan sarana kelembagaan untuk mengkooptasi organisasi dengan membuat mereka bagian dari lengan eksekutif pemerintah, tapi kooptasi juga ada dalam bentuk yang jauh lebih halus dan canggih, di mana hubungan simbiosis ada pada tingkat informal.

Di antara badan dan organisasi yang dipilih/dikooptasi oleh pemerintah untuk memainkan perannya dalam mengelola agama adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Persatuan Guru Agama Islam (PERGAS).

1. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah birokrasi agama yang disponsori negara dengan status badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola urusan agama Islam. Semua pengurus kunci dalam MUIS, termasuk Mufti (pemimpin agama Muslim) ditunjuk oleh presiden berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri.⁹³ Ketua MUIS tidak lain adalah Menteri PAP untuk urusan Muslim PAP.

Dengan demikian:

“Pelaksanaan syiar dan dinamika Islam di Singapura terkait erat dengan fungsi dan peran penting MUIS sebagai lembaga tertinggi pemerintah untuk urusan agama Islam. Institusi yang setingkat Kementerian Agama di Indonesia ini didirikan sejak tanggal 1 Juli 1968 dan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas seluruh aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan urusan peribadahan, hukum, perekonomian, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan Islam”.⁹⁴

Lebih jelasnya, MUIS mempunyai tugas dan fungsi utama memberi saran kepada presiden dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam”.⁹⁵

Selain itu, MUIS juga berperan dalam

“mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum Muslimin, termasuk urusan haji dan sertifikasi halal bagi makanan yang dikonsumsi, mengelola wakaf dan dana kaum Muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah, mengelola pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam, atau untuk kepentingan umat Islam, serta mengelola semua mesjid dan madrasah di Singapura.

Dalam prakteknya –seperti yang disampaikan oleh salah seorang responden yang juga pengurus MUIS– badan resmi milik negara ini juga

“melakukan pengawasan terhadap mesjid-mesjid; memiliki wewenang untuk menyetujui calon komite manajemen mesjid; mengelola dana pembangunan Mesjid (MBF) yang mengumpulkan sumbangan uang dari pekerja Singapura untuk pembangunan dan pemeliharaan mesjid. MUIS juga memiliki wewenang terhadap kurikulum pendidikan agama, pernikahan, pengelolaan kurban, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1975, semua jamaah haji harus mendaftar kepada MUIS dan hanya bisa melakukan haji melalui persetujuan MUIS. Selain itu, MUIS juga menyediakan teks khutbah Jumat serta mengawasi pelaksanaan khutbah Jumat di setiap mesjid untuk memastikan

⁹³. Suzaina Kadir, 2004 ‘Islam, State and Society in Singapore’, *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol.5, No.3, hlm. 360.

⁹⁴. Helmiati, “Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekular & Multikultural”, *Toleransi*, vol.5 no. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 90.

⁹⁵. Website Majelis Ugama Islam Singapura, <http://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2013.

isinya sesuai dengan konsep negara Singapura yang majemuk. Para penceramah (*asatiz*) pun diwajibkan mengurus sertifikat atau izin ceramah kepada MUIS sebelum mereka berceramah. Untuk memperoleh sertifikat/izin mereka terlebih dahulu wajib mengikuti program sertifikasi berupa pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga, pemahaman dan kompetensi keagamaannya juga secara periodik diup-grade dan diup-date”.

Salah seorang Ustadzah pada madrasah Andalus, kepada peneliti menyatakan:

“... intinya adalah *brain washing* untuk memastikan bahwa arah dan orientasi pengajaran dan ceramah agama yang akan disampaikan adalah ajaran Islam ala Singapura, tidak mengarah pada fundamentalisme dan radikalisme serta tidak keluar dari koridor yang ditentukan pemerintah, yaitu ajaran Islam yang tetap “memelihara harmoni antar agama”.⁹⁶

“MUIS yang menempati gedung megah di 273 Braddel Road, tepatnya di komplek *Islamic Centre* Singapura ini juga mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari komunitas umat Islam Singapura. Selain itu, MUIS juga *concern* terhadap kehalalan sebuah produk atau sertifikasi halal”.

Seperti dibahas sebelumnya, ada banyak alasan mengapa negara mengkooptasi sebuah organisasi dan banyak alasan pula bagi organisasi untuk menyetujui pengkooptasian tersebut. MUIS baik secara formal (kelembagaan) dan informal (ideologis) dikooptasi oleh negara. Selain itu, ini adalah keputusan sadar yang dibuat oleh MUIS. Institusi ini sepenuhnya menyadari biaya dan manfaat dari perjanjian ini. Proses kooptasi terhadap MUIS adalah sebuah pendekatan yang diambil negara untuk mengelola agama demi stabilitas sosial Singapura. Ini merupakan versi Singapura yang berbeda sebagai negara yang menganut sekularisme. Di sini, strategi Sekularisme Otot (*muscular secularism*) dan Sekularisme Dikalibrasi (*calibrated secularism*) digunakan secara bersamaan terhadap MUIS. Strategi Sekularisme Otot digunakan dalam konteks di mana ada hukum-hukum yang ketat yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan MUIS, dan itu adalah kooptasi resmi. Sedangkan dikalibrasi sekularisme adalah dalam konteks di mana MUIS secara ideologi juga dikooptasi.

Hal ini tidak berbeda dengan pengalaman negara Malaysia, di mana seringkali digembar-gemborkan sebagai contoh Islam “moderat” dan stabilitas sosial. Menurut Hamayotsu, Malaysia telah berhasil membirokratisasi dan melembagakan organisasi keagamaan melalui berbagai metode, terutama kooptasi, sehingga ekstremisme agama dapat ditahan. Dia berpendapat bahwa motivasi negara untuk mengkooptasi organisasi keagamaan didorong oleh tiga faktor utama: *Pertama*, untuk menahan ekstremisme agama. *Kedua*, untuk mendapatkan legitimasi dari Melayu/Muslim dan memenangkan kompetisi pada pemilihan umum melawan partai-partai oposisi (terutama Parti Islam Se-Malaysia/PAS) dan akhirnya, keinginan oleh aktor negara untuk memperoleh dukungan dalam partai mereka sendiri (sebagai seseorang yang dianggap sebagai pro-Islam mungkin mendapatkan dukungan tambahan bahkan dari dalam partai). Sementara alasan ketiga mungkin tidak relevan dengan konteks

⁹⁶. Wawancara dengan salah seorang ustadzah pada madrasah Andalus pada tanggal 9 November 2015.

Singapura, saya setuju dengan dua faktor pertama, meskipun dengan tingkat yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mencegah ekstrimisme dan radikalisme adalah dengan mengkooptasi organisasi agama dan ulama. Organisasi keagamaan, pada gilirannya, menyadari manfaat dari bekerja sama dengan negara sedemikian rupa. Namun, dengan membiarkan diri mereka terkooptasi, kredibilitas mereka menjadi dipertanyakan oleh konstituen mereka sendiri.

Persepsi masyarakat Muslim tentang MUIS sebagai badan yang dipengaruhi oleh negara ditegaskan oleh presiden Persatuan Guru Agama Islam Singapura (PERGAS), Uztaz Hasbi, pada tahun 2003. Dia mengumumkan bahwa PERGAS harus berfungsi sebagai jangkar moral bagi umat Islam di Singapura karena:

“MUIS tidak bisa melakukannya ... MUIS adalah badan hukum, mereka harus melayani kepentingan negara. Karena itu adalah tanggung jawab kita untuk melayani kepentingan masyarakat Muslim”.⁹⁷

Demikian pula, banyak organisasi komunitas Muslim dipengaruhi pemerintah dengan ketergantungan mereka pada dana negara dan posisi dominan politisi PAP dalam organisasi tersebut. Misalnya, Ketua organisasi swadaya Muslim Mendaki adalah Menteri PAP, Yaacob Ibrahim. Beberapa anggota parlemen PAP juga di Direksi Dewan Mendaki. Selain itu, negara berhasil mengelola dana (*Central Provident Fund*) yang memfasilitasi pengumpulan sumbangan pembangunan Mesjid, sementara Konstitusi Singapura menyediakan hukum agama dan pribadi khusus dan pengadilan syariah bagi umat Islam.

Jadi meskipun mekanisme legislatif dan kebijakan yang seolah-olah memperkuat pemisahan agama dan politik, negara terus mencampuri ranah agama. Dengan demikian akan muncul bahwa pemisahan agama dan politik hanya berlaku untuk warga negara dan bukan pemerintah PAP.

Selain itu, perlu dicatat bahwa pemerintah PAP mendukung organisasi kesejahteraan berdasarkan agama yang memainkan peran penting dalam membantu mereka yang kurang beruntung secara sosial. Organisasi keagamaan Islam yang turut berperan aktif dalam membantu kegiatan kesejahteraan sosial (*social welfare*) ini antara lain adalah *Jamiyah* dan *Muhammadiyah*. Kedua lembaga ini juga di pilih (dikooptasi) oleh pemerintah dalam menangani pelayanan lanjut usia baik secara fisik maupun psikis; membantu kesejahteraan kaum *dhu'afa*; dan menyediakan pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak dan remaja yang bermasalah, pelaku kriminal, atau yang orangtuanya bermasalah sehingga tidak dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya.⁹⁸ Untuk pendanaan operasional kegiatan tersebut, sebagian besar diperoleh oleh baik *Jamiyah* maupun *Muhammadiyah* dari pemerintah.

Jamiyah berperan penting dalam masyarakat Singapura kontemporer melalui program bantuan untuk ekonomi lemah dan korban narkoba dan bantuan berupa beasiswa untuk mengakses pendidikan modern bagi masyarakat Melayu

⁹⁷. Suzaina Kadir, 'Muslim Politics, the State and Society', in Kenneth Paul Tan (ed.), *Renaissance Singapore?: Economy, Culture and Politics*, (Singapore: NUS Press, 2007), hlm. 150.

⁹⁸. Wawancara dengan Dr. Zuremi, Direktur Program Diploma Muhammadiyah Association pada tanggal 11 November 2015, dan Dr. Isa Hassan, Vice Rektor III, *Jamiyah* pada tanggal 13 November 2015.

terbelakang. Selain itu, juga menyediakan layanan kesehatan dan konsultasi hukum dan konseling secara *free* bagi yang membutuhkan. Dakwah versi Jamiyah dilaksanakan *bi al-hal wa al-mal*. berdakwah berarti menjadi teladanan dan aktif mengurus kesejahteraan umat.

Apa yang dilakukan oleh dua organisasi keagamaan ini sejalan dengan pendekatan pemerintah 'banyak tangan membantu kesejahteraan yang berfungsi untuk meminimalkan pengeluaran biaya kesejahteraan. Selain itu, institusi Mesjid juga telah lama menyediakan layanan sosial dalam bentuk kelas kuliah remedial, haji dan kelas bahasa Arab, beasiswa, voucher makanan untuk keluarga berpenghasilan rendah, layanan konseling dan program rehabilitasi untuk mereformasi anak nakal dan pelaku kriminal.

D. Pengaturan dan Pengawasan Ketat terhadap Kegiatan Keagamaan

Konstitusi Singapura memberikan kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat dan beragama. Secara khusus, Pasal 12 menjamin persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi ras dan agama, Pasal 14 memberikan kebebasan berekspresi dan Pasal 15 kebebasan beragama dan pengamalannya. Demikian pula, Pasal 16 (2) dan Pasal 16 (3) memberikan hak pada setiap kelompok agama untuk mendirikan, memelihara lembaga pendidikan dan menawarkan pembelajaran atau mengambil bagian dalam upacara atau tindakan atau ibadah dari agama selain agama mereka sendiri. Namun, sementara Pasal 15 memberikan hak untuk kebebasan dan praktik keagamaan, hak ini tunduk pada aturan dimana warga tidak boleh melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moralitas. Hak bersyarat ini memungkinkan pemerintah PAP untuk menentukan kegiatan keagamaan 'yang tepat'.

Sejumlah undang-undang dan kebijakan administratif telah membatasi hak konstitusional dan sipil dari warga Singapura dengan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum. Ada beberapa regulasi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan agama dan menjaga meritokrasi antar agama dan etnis. Selain itu juga terdapat regulasi yang diarahkan untuk membatasi politisasi agama dengan mencoba untuk memisahkan agama dari politik, mengatur kegiatan keagamaan dan menahan perkembangan masyarakat sipil Muslim otonom. Berikut uraian dari aturan dan regulasi dimaksud:

1. Undang-Undang Pemeliharaan Harmoni Agama (MHRA)

Negara kota ini memiliki ciri khas yang unik dengan menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah menyusun undang-undang penegakkan pemisahan agama dan politik –yang dimaksudkan untuk kepentingan menjaga 'kerukunan beragama' dan menjamin agama tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik atau tujuan subversif. Undang-undang ini dikenal dengan istilah “*Maintenance of Religious Harmony Act*” (MRHA) yang disahkan oleh parlemen pada November 1990 dan mulai diberlakukan sejak 31 Maret 1992.

Agaknya sifat dari komposisi etnis-religius, dan ketakutan pemerintah yang mendalam terkait perbedaan masyarakat berdasarkan garis etnis atau agama, telah menyebabkan pemerintah merumuskan doktrin kerukunan umat beragama yang ketat di Singapura, sebagaimana diakui oleh responden penelitian ini.⁹⁹

Alasan mengapa undang-undang ini diperlukan, disampaikan dalam *White Paper* yang dipresentasikan di parlemen dalam rangka mengusulkan undang-undang ini pada tahun 1989, yaitu bahwa Singapura belum kebal terhadap kenaikan semangat keagamaan di seluruh dunia. Kelompok agama di Singapura telah menjadi lebih tegas dan bersaing lebih intens untuk memperoleh pengikut dari sebelumnya. Ini telah meningkatkan kemungkinan gesekan antar-agama dan kesalahpahaman di masyarakat multi-rasial dan multi-agama seperti Singapura. Seiring dengan kebangkitan Islam di dunia, pada tahun 1980-an, religiusitas masyarakat di Singapura juga meningkat. Sejumlah insiden terjadi yang melibatkan Hindu, Muslim dan Kristen di Singapura. Selama periode ini ada sejumlah keluhan tentang metode penginjilan yang agak sensitif dari beberapa penganut Kristen. Hal ini turut menjadi daya dorong yang melatarbelakangi munculnya MHRA.¹⁰⁰

Selain itu *White Paper* juga mengidentifikasi dua kondisi penting yang diperlukan untuk kerukunan umat beragama di Singapura. Pertama, pengikut agama harus berlatih bersikap dan berperilaku moderat, bertoleransi serta menghindari melakukan hal-hal yang menyebabkan permusuhan atau kesalahpahaman antar kelompok agama. Kedua, agama dan politik harus dipisahkan, karena jika satu kelompok agama menjadi terlibat dalam politik, kelompok agama lain akan mengikutinya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, partai politik mungkin kemudian menganjurkan kebijakan yang mendukung satu kelompok atau lainnya untuk menggalang dukungan dari para pengikutnya. Dampaknya akan menyebabkan persaingan dan ketegangan antar-agama, dan konsekuensi akhirnya adalah konflik dan ketidakstabilan politik.

Selain ketakutan pemerintah yang mendalam terkait perbedaan etnis dan agama, pengalaman pahit dalam sejarah Singapura¹⁰¹ turut menyulut rasa ketakutan sebagian kelompok dalam pemerintahan PAP yang menilai sentimen agama dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik, dan berpotensi memberikan dampak serius pada stabilitas politik Singapura dan kelangsungan hidup ekonomi. Hal ini – dengan demikian – turut menjadi alasan pemerintah memandang perlu ada undang-undang Pemeliharaan Harmoni Agama (MHRA). Karena salah satu katalis utama dikeluarkannya regulasi MHRA oleh pemerintah terkait penangkapan Vincent Cheng, seorang Katolik Roma dan rekan-rekannya yang disinyalir membentuk kelompok politik dengan tujuan menumbangkan sistem sosial dan politik yang ada di Singapura yang disebut dengan Konspirasi Marxis.

⁹⁹. Wawancara dengan Ust. Zuremi, Direktur Program Diploma pada Muhammadiyah Association di kantornya, pada tanggal 11 November 2015.

¹⁰⁰. Ronald Chia, *How You Preserve Religious Harmony in Multi-Religious Singapore ?* The Methodist Church in Singapore .

¹⁰¹. Ketegangan etnis yang berdampak pada distabilitas sosial mengancam Singapura pada tahun 1969, menewaskan 4 (empat) orang dan 80 orang luka-luka. Setelah Singapur berpisah dari Malaysia dan menjadi Negara Republik tahun 1965, pemerintah memiliki visi-misi untuk menjadi “Singaporean Singapore” dengan membangun identitas nasional di kalangan empat kelompok utama etnis; Cina, Melayu, India dan Eurasia.

Perhatian utama di balik MRHA jelas diartikulasikan oleh Menteri Senior S. Jayakumar dalam sebuah wawancara dengan *The Straits Times*:

"Peningkatan religiusitas itu sendiri tidak masalah. Saya melihat salahnya adalah adanya kelompok agama yang aktif dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pengikut untuk meningkatkan jumlah mereka. Sementara masyarakat kita adalah multi-rasial dan multi-agama".¹⁰²

Dengan demikian, regulasi MHRA dianggap penting oleh pemerintah dalam rangka pelestarian hubungan damai antara kelompok dan mencegah aliansi yang tidak diinginkan antara agama dan politik.¹⁰³ Karenanya MRHA mengusulkan pemisahan ketat antara agama dan politik sebagai sarana untuk menjamin koeksistensi damai dari komunitas agama yang berbeda di Singapura.¹⁰⁴ MHRA memperingatkan pemimpin atau anggota kelompok agama untuk tidak menggunakan agama dalam mempromosikan partai politik tertentu. Regulasi ini juga melarang politisi menggunakan gereja, mesjid atau kuil untuk memobilisasi dukungan untuk kampanye politik mereka. Selain itu, MHRA juga menasehati para pemimpin agama untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan hati-hati. Uskup Agung, mufti/ulama, pendeta tidak boleh menggunakan otoritas keagamaan mereka untuk memobilisasi oposisi terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Paragraf ke-22 mengungkapkan esensi MRHA ketika menyatakan :

"Anggota kelompok agama dapat, tentu saja, berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis sebagai perorangan warga negara. Mereka mungkin mengkampanyekan atau melawan pemerintah atau partai politik. Tapi mereka tidak harus melakukannya sebagai pemimpin konstituen agama mereka."¹⁰⁵

Undang-undang tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan rasa permusuhan, kebencian, niat buruk atau permusuhan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda, serta untuk mencegah politik komunal dengan kedok agama. Hal ini meluas sehingga memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah terhadap hal-hal yang dianggap kegiatan politik terkait kegiatan keagamaan, meredakan situasi yang mengancam yang mungkin meningkat menjadi konflik sentimen keagamaan. Dengan adanya regulasi ini pemerintah dapat mengambil tindakan dengan cepat.

Meskipun sifat komprehensif dari MRHA, pemerintah PAP belum jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'kerukunan beragama'. Selain itu, parameter kegiatan keagamaan yang diperbolehkan tetap ambigu. Ambiguitas ini telah memperkuat budaya ketakutan dalam masyarakat agama dan masyarakat yang lebih besar.

¹⁰². Strait Times, 25 Juli 2009.

¹⁰³. Paragraf ke 27 *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA).

¹⁰⁴. Paragraf ke-13 dan 14 *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA).

¹⁰⁵. Paragraf ke 22 *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA).

Mengingat semua kekhawatiran dan perdebatan yang mengarah pada pemberlakuan Undang-Undang tersebut, 17 tahun pertama pemberlakuannya, cara kerja MRHA sudah tergerus tidak terdeteksi oleh mata publik. Tidak ada perintah penahanan yang pernah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri di Parlemen pada tahun 2007.

Apakah Undang-Undang itu hanya kebijakan belaka? Jauh dari itu, Kadir menilai, meskipun fakta bahwa tidak ada perintah penahanan telah dikeluarkan sampai saat itu, UU itu lebih dari sekedar kebijakan dalam kerangka hukum yang luas yang mengontrol secara ketat peran agama dalam masyarakat. UU tersebut menurutnya mencerminkan instink paternalistik kepemimpinan politik yang kuat dalam merestrukturisasi perilaku pemilih dan mengarahkan politik menuju ke visinya. Hal itu menurutnya menggambarkan posisi ideologis pemerintah, menggaris-bawahi ketidakpercayaan yang mendalam kepemimpinan politik terhadap pemilih dan posisinya. Lebih penting lagi, UU tersebut menurutnya berfungsi membersihkan agama dari ruang politik sentral.¹⁰⁶ Undang-undang tersebut meskipun berpenampilan jinak, bukan tanpa kekuatan koersif untuk mengawal agar pemimpin agama sejalan, atau mencegah perdebatan politik. UU tersebut menghilangkan pengaruh agama dari kontestasi politik. Perhatian utama komunitas Muslim dalam hal ini adalah pada pemisahan agama dari politik, karena hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan.

2. UU Keamanan Dalam Negeri / *Internal Security Act* (ISA)

Internal Security Act (ISA) atau yang dikenal juga dengan Undang-undang Keamanan dalam Negeri dinilai sebagian kalangan sebagai bagian yang tidak lazim pada suatu undang-undang, yang mana penahanan dapat dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini melanggar UU kebebasan masyarakat, seperti yang terdapat Bagian IV Pasal 9 (1) dan 12 (1) UU tentang kebebasan pribadi, persamaan hak di mata hukum serta perlindungan hukum secara adil.

Undang-undang yang keras seperti *Internal Security Act* (ISA) telah sangat menimbulkan budaya ketakutan. Dulu, UU ini dirancang dan digunakan oleh pemerintah kolonial Inggris dalam kampanye Perang Dingin mereka melawan komunis dan nasionalis radikal lainnya. Pemerintah PAP tidak hanya mempertahankan undang-undang dan kebijakan ini tetapi memperluas ruang lingkup dan jangkauannya. ISA memungkinkan pembaharuan penahanan tanpa pengadilan selama dua tahun. ISA digunakan terhadap mereka yang dianggap bertindak dengan cara yang merugikan keamanan Singapura. UU tersebut adalah tipikal pemerintah yang 'berkuasa karena hukum' di negara-negara otoriter di mana eksekutif secara rutin ditimpa kekuatan negara lain seperti peradilan hukum dan legislasi. Hal ini memungkinkan hak eksekutif tidak harus memberikan bukti terhadap para tahanan ke pengadilan. Hak eksekutif ini didasarkan pada premis bahwa masyarakat percaya pada integritas pemerintah eksekutif dan negara dalam menjalankan amanah ini.

¹⁰⁶. *Ibid.*

Secara signifikan, undang-undang dan kebijakan administratif ini telah dikritik oleh badan-badan internasional seperti Komisi Ahli Hukum Internasional, *Amnesty International*, *Asia Watch* dan *Human Rights Watch* karena kegagalannya menyesuaikan dengan hukum internasional. Laporan *Amnesty International* tahun 2009, misalnya menyatakan bahwa pembatasan ketat pada kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat; penolakan hak proses hukum; penggunaan regulasi tentang pencemaran nama baik dan tindakan pembatasan secara sistematis, serta kontrol yang ketat pada kegiatan politik independen, undang-undang keamanan internal dan hukum pidana yang mengizinkan penahanan berkepanjangan tersangka tanpa pengadilan telah mengabaikan aktivis oposisi, pembela hak asasi manusia, media asing dan penentang yang teliti. Iklim ketakutan dan sensor ketat negara Singapura tidak mendorong Singapura sepenuhnya berpartisipasi dalam urusan publik¹⁰⁷

Adanya penahanan tanpa pengadilan berdasarkan ISA telah menyebabkan masalah bagi pemerintah Singapura untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 dan menentang ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* - UDHR). Undang-undang yang dinilai kejam tersebut juga telah membuat masalah bagi pembentukan Komisi HAM Nasional – yang telah lama didirikan di negara tetangga Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina dan dalam proses pembentukan dalam kelompok regional ASEAN. Lily Zubaidah Rahim menilai penggunaan ISA oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam pelaksanaannya, UU Keamanan Dalam Negeri ini (ISA) dapat tertutupi dengan adanya UU “*Legislation Against Subversion*”, pada pasal 149 yang menyebutkan bahwa: tindakan dapat diambil baik di dalam maupun di luar Singapura apabila:

- a. Menyebabkan masyarakat takut dan kekerasan terorganisir terhadap orang lain.
- b. Tindakan/kegiatan yang dapat membangkitkan ketidakpuasan terhadap presiden atau pemerintah.
- c. Tindakan yang memprovokasi permusuhan antar ras, kelas-kelas tertentu dan cenderung menimbulkan kekerasan.
- d. Tindakan untuk mendapatkan perubahan dengan cara yang bertentangan.
- e. Kegiatan/tindakan yang merugikan keamanan Singapura.

Undang-undang ini berdampak pada pembatasan kebebasan dalam berbicara, berkumpul dan berserikat. Untuk melengkapi pasal 149 maka pada ISA terdapat penjelasan bahwa, tindakan akan diambil apabila terjadi peristiwa/tindakan kekerasan terorganisir yang menyebabkan sebagian warga menjadi takut, dan dapat merugikan keamanan Singapura.

Ada kalangan yang menilai bahwa ISA merupakan regulasi yang kejam dan mengekang kebebasan, termasuk kebebasan dalam menjalankan agama. Namun demikian, ketika salah seorang responden penelitian ini ditanya pandangannya tentang hal ini, tanggapannya adalah sebagaimana berikut:

¹⁰⁷. Laporan Amnesti Internasional, 2009.

“ISA diterapkan di Singapura sebagai salah satu cara negara untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga harmoni antar umat beragama. ISA bukan hanya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama saja, tetapi juga meliputi segala kegiatan yang dapat merusak keamanan, kegiatan yang menimbulkan permusuhan antar etnik dan ras, tindakan kekerasan dan semua tindakan yang dapat merugikan negara. Dengan adanya ISA pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lancar tanpa ada gangguan”.

Hal yang tidak kalah menarik untuk di singgung dalam konteks ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lily Zubaidah Rahim. Ia menjelaskan bagaimana kekangan pihak penguasa terhadap media massa di negara tersebut. Pemerintah mengambil tindakan terhadap pers dan media yang melanggar peraturan melalui *Akta Percetakan Akhbar*. Sebagai contoh, pada 1985, *Asian Wall Street Journal* telah dikenakan tuduhan menghina dan 1987, edaran FEER dikurangkan dari 9,000 menjadi 500 naskhah disebabkan laporannya tentang penahanan ISA pada tahun itu. Selain itu, edaran *The Asian Wall Street Journal* juga telah dibatasi dari 5,000 kepada 400 naskhah pada tahun 1987.

3. UU Hasutan (*Sedition Act*) dan UU Masyarakat (*Society Act*)

Regulasi lainnya yang cukup membelenggu dan menjadi senjata pemerintah untuk mengawal secara ketat pelaksanaan agama adalah UU Hasutan (*Sedition Act*) dan UU Masyarakat (*Society Act*). Sama dengan ISA, kedua undang-undang ini juga berasal dari pemerintahan kolonial Inggris. Dulu, undang-undang ini digunakan oleh Inggris untuk menentang komunis dan nasionalis radikal di era kolonial dan pasca-kolonial. Undang-Undang hasutan menyediakan tindak pidana yang berkaitan dengan ras dan kelas -termasuk mengotori tempat ibadah, mengganggu majelis agama, mengucapkan kata-kata atau suara, dan dengan sengaja melukai perasaan keagamaan. Hal demikian merupakan pelanggaran untuk mempromosikan perasaan permusuhan antara kelompok etnis yang berbeda atau kelas penduduk. Pada tahun 2005, tiga blogger dihukum berdasarkan Undang-Undang tersebut karena memposting komentar web-blog yang anti-Muslim. Pada tahun 2007, seseorang menerima peringatan keras kare memposting kartun yang menentang Yesus dan pada tahun berikutnya, beberapa orang juga kena karena mendistribusikan publikasi yang menghasut dan tidak pantas untuk Muslim. Dalam publikasi ini, Islam disebut sebagai 'iman yang berbahaya'¹⁰⁸

Berdasarkan UU masyarakat (*Societies Act*), pendaftaran masyarakat tidak otomatis tetapi dengan penyelidikan oleh Panitera Societies. Persyaratan ini memberikan sarana yang kuat bagi pemerintah mengutuk kelompok agama yang dianggap merugikan perdamaian, kesejahteraan atau ketertiban sosial¹⁰⁹). Karena Societies Act melarang keterlibatan politik organisasi yang tidak secara khusus terdaftar untuk tujuan itu, hal itu secara efektif mengintimidasi dan mengancam aktor masyarakat yang tidak teregistrasi atau yang deregistrasi yang telah terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah. Kelompok agama yang telah berjalan

¹⁰⁸ . Elena Chong, 'Couple Go on Trial for Sedition', *Straits Times*, 5 December 2008.

¹⁰⁹. *Ibid*,

dari agenda pembangunan bangsa yang dibuat pemerintah dan menderita deregistrasi termasuk Saksi Yehuwa (JW) dan Gereja Unifikasi, masing-masing dideregistrasi pada tahun 1972 dan 1982. Yang pertama deregistrasi karena pemerintah tidak mengakui keberatan hati nurani untuk dinas militer. Sampai saat ini, 26 Saksi-Saksi Yehuwa terus dipenjara karena menolak untuk mendaftarkan diri pada layanan wajib militer. Secara signifikan, deregistrasi melarang gereja-gereja ini mengadakan pertemuan publik. Pemerintah juga telah melarang semua materi tertulis yang diterbitkan oleh Saksi Yehuwa.

E. Sekularisme Strategis Negara Singapura

Mencermati peran penting yang dilakukan oleh MUIS sebagai badan resmi negara dalam mengelola urusan agama Islam di satu sisi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan tidak pro-Islam di sisi lain, patut dipertanyakan bagaimanakah sesungguhnya konsep sekularisme negara yang dimaksud oleh pemerintah?

George Yeo, menteri informasi, komunikasi dan seni menegaskan: “*Singapore’s government is secular, but it is certainly not atheistic*”.¹¹⁰ Pandangan bahwa ‘pemerintah Singapura adalah sekuler, tetapi hal ini tentunya tidak ateis (tidak bertuhan)’ menggambarkan tentang paham sekularisme strategis pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa lebih dari 80% penduduk Singapura memiliki keyakinan (agama), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Agama dan Afiliasi Kepercayaan di Singapura (%), 2010.

Kepercayaan Agama	Persentase
Kristen	18
Budha	33
Tao dan Kong Hu Cu	11
Islam	15
Hindu	5.1
Agama lain (Sikh, dll.)	0.9
Tidak Beragama	17
Total	100

Sumber: Sensus Penduduk Singapore 2010.¹¹¹

Di Singapura, keyakinan agama secara kuat dibagi berdasarkan garis etnis. 99,6% dari Melayu adalah Muslim, 66,4% dari Cina beragama Buddha dan Tao, 55,4% dari India beragama Hindu dan 50% dari etnis minoritas (disebut sebagai ‘orang lain’) adalah orang Kristen. Melayu dengan demikian adalah masyarakat etnis yang paling homogen dalam hal agama. Hal ini telah menyebabkan kategori

¹¹⁰. Lily Zubaidah Rahim, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore’s Secular Authoritarian State*, hlm. 2

¹¹¹. Singapore Department of Statistics, *Pers Release : Census of population 2010: Statistical Release 1 on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion*. Diakses pada 4 September 2013.

Melayu dan Muslim digunakan secara sinonim dengan identitas Muslim dan diperlakukan sebagai bagian integral identitas Melayu.¹¹²

Sementara itu, Pereira menjelaskan bahwa Singapura sebagai negara sekuler tidak berarti pengamalan agama tidak dibenarkan, melainkan punya makna bahwa negara tidak memiliki agama resmi. Konstitusi secara jelas menyebutkan bahwa agama merupakan masalah pribadi yang harus dipisahkan dari urusan politik. Berikut pernyataan Pereira:

*"Singapore is officially a secular society. This does not mean that the practice of religion is disallowed; instead, Singapore is secular in so far as there is no official state religion, and the constitution state very clearly that religion is private issue which must be kept separate from politics".*¹¹³

Meskipun di satu sisi negara bersifat sekuler –memposisikan agama sebagai persoalan pribadi dan terpisah dari ranah politik dan publik– namun di sisi lain pemerintah tetap memandang perlu mengatur urusan agama. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memandang perlu mengatur urusan agama. *Pertama*, karena mereka tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa keragaman agama (multi-religi) tanpa pengelolaan dan pengaturan yang baik, cenderung menyebabkan ketegangan sosial (*communal tensions*) kalau bukan konflik sosial. Hal ini menjadi persoalan serius bagi pemerintah karena agama-agama atau apapun yang saling berbeda itu akan berhadapan dengan tuntutan menjaga "kemurnian" ajaran dan keyakinannya. Karena tuntutan itulah kemudian muncul di kalangan penganut agama yang berbeda itu sikap eksklusif yang tidak menerima kehadiran "*the other*". Ketaatan dalam menjalankan agama kadang menciptakan pula jarak sosial tertentu, yang pada akhirnya dapat menguat menjadi kelompok sosial yang terpisah satu sama lain, seperti dikemukakan Nasir berikut ini:

*"Our study shows that, other things being equal, the practice of religious piety will create a certain social distance between social groups and eventually these social divisions can harden into separate enclaves. The role of the state is to manage such social process in the interest of creating a social unity and where possible it should seek to convince its citizens that such social harmony is not simply artificial".*¹¹⁴

Menyusul serangan teroris 11 September 2001 dan selanjutnya penahanan tersangka Jemaah Islamiah (JI) militan di Singapura, negara Singapura semakin waspada dalam membuat kebijakan terhadap komunitas Muslim lokal. Hal ini antara lain dapat ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan pemahaman antar-agama melalui inisiatif seperti Lingkaran Antar-Keyakinan Agama (IRCC) dan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama (DRH). Kebijakan yang waspada terhadap komunitas Muslim sangat didorong oleh kekhawatiran bahwa fondasi sekuler negara-negara regional seperti Malaysia dan Indonesia telah ditumbangkan oleh 'Islamisasi' –ditunjukkan oleh kemampuan beberapa partai Islam dan organisasi untuk mencapai dukungan elektoral yang cukup, memperluas jangkauan syariah (hukum Islam) dan secara bertahap Islamisasi partai politik

¹¹². Lily Zubaidah Rahim, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*, hlm. 3.

¹¹³. Alexius A. Pereira, *Religiosity and Economic Development in Singapore*, *Journal of Contemporary Religion*, Volume 20, No.2, 2005. hlm. 161-178.

¹¹⁴. Kamaludeen Mohamed Nasir, dkk. *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*, hlm. 4.

sekuler. Dihadapkan dengan *trend* Islamisasi global dan regional, legislasi dan pengawasan pemerintah yang diharapkan dapat melindungi negara kota tersebut dari serangan ideasional politik Islam.

Mempertahankan pengawasan yang ketat pada pengaruh regional dan internasional, pemerintah PAP bergerak sangat hati-hati terhadap ancaman yang dirasakan. Sebagaimana catatan Tan, sejak 11 September 2001:

"Close scrutiny, interventionist surveillance and ultra-sensitivity to internal security concerns are hallmarks of the government's policy towards religion"

"pengawasan ketat, pengawasan intervensionis dan kepekaan ultra terhadap masalah keunggulan keamanan internal merupakan kebijakan pemerintah terhadap agama".¹¹⁵

Secara khusus, peningkatan tingkat religiusitas Muslim di Singapura dipandang sebagai masyarakat yang rentan terhadap propaganda Islam radikal.¹¹⁶ Bahkan jika tidak rentan terhadap propaganda Islam radikal, religiusitas mereka saja sudah dianggap merugikan tatanan sosial masyarakat multiras. Lee Kuan Yew, misalnya mencerminkan keprihatinan ini dengan memperingatkan Muslim pada tahun 2007 sebagai berikut:

*"over the last 3 decades many Muslims in Singapore and the region are becoming stricter in their dress, diet, religious observances, and even social interaction, especially with non-Muslims...My original concern was over the growing separateness of our Muslim community".*¹¹⁷

"selama lebih dari tiga dekade terakhir banyak Muslim di Singapura dan wilayah ini menjadi ketat dalam pakaian mereka, diet, perayaan agama, dan bahkan interaksi sosial, terutama dengan non-Muslim ... Perhatian utama saya adalah semakin terpisahya komunitas Muslim kita "

Alasan kedua mengapa pemerintah perlu mengatur urusan agama adalah karena tak dapat dipungkiri bahwa agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas dan kewarganegaraan yang baik. Seperti dikemukakan Pereira, "agama telah dianggap sebagai sarana untuk memberikan panduan moral dan sarana melawan nilai-nilai negatif yang berhubungan dengan modernitas.¹¹⁸ Karena itu, pemerintah selalu menyisihkan ruang bagi organisasi keagamaan dan lahan untuk pembangunan rumah ibadah agama-agama besar seperti gereja, mesjid, dan tempat-tempat ibadah agama lainnya. Pembangunan rumah ibadah ini antara lain dilakukan di komplek rumah susun baru (*flat*) yang dibangun pemerintah.¹¹⁹ Saat ini terdapat lebih kurang 22 mesjid yang telah dibangun di estet perumahan dengan Dana Pembinaan Mesjid (DPM) atau *Mosque Building Fund* (MBF). Yang

¹¹⁵ . Tan, Eugene K.B. 'Norming "Moderation" in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore', *Terrorism and Political Violence*, Vol.19. , 2007. hlm. 444.

¹¹⁶. Tan, Eugene K.B. 'Norming "Moderation" in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore', hlm. 444.

¹¹⁷. Tan, Eugene K.B. 'Norming "Moderation" in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore', hlm. 447.

¹¹⁸. Alexius A. Pereira, 2005 'Religiosity and Economic Development in Singapore', *Journal of Contemporary Religion*, Vol. 20, No. 2, hlm. 171-172.

¹¹⁹. B. H. Chua, *Political Legitimacy and Housing: Stakeholding in Singapore*, (London: Routledge, 1997).

terakhir ini merupakan sumbangan dari pekerja Muslim melalui pemotongan gaji mereka setiap bulan.

Singkatnya, pemerintah mengizinkan dan bahkan mendorong pengamalan agama selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan agar agama tidak masuk ke ranah politik dan selama tidak mengancam keharmonisan antar warga.¹²⁰ Dengan alasan untuk menjaga keharmonisan antar warga negara yang multi-religi dan multikultural serta menjaga stabilitas sosial, maka pemerintah mengawasi secara ketat aktivitas-aktivitas keagamaan tersebut.

Pengaturan dimaksud terbukti dari kebijakan pemerintah dalam intervensinya pada manajemen Islam, Hindu, Sikhisme, dan lain-lain. Hal ini tercermin dari pembentukan sejumlah lembaga agama atau badan selalu berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek terkait pengamalan agama.¹²¹ Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menjadi contoh yang relevan terkait agama Islam. Selain mengkoordinir pengumpulan dana untuk pembangunan mesjid melalui Dana Pembinaan Mesjid (DPM) atau *Mosque Building Fund* (MBF), pemerintah juga misalnya memberikan hari libur keagamaan. Selain itu, Konstitusi Singapura, di sisi lain, mengamanatkan diberlakukannya hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyiyah*) dan pengadilan syariah bagi umat Islam.¹²²

Dengan demikian, Thio mengatakan:

“ironis bila sementara dalam Akta Pemeliharaan Keharmonisan antar Agama (*Maintenance of Religious Harmony Act* /MRHA) menuntut agar urusan agama dipisahkan dari persoalan politik, dalam faktanya sikap pemerintah masih saja mengaitkan urusan agama dan kebijakan publik”.¹²³

Pemerintah dalam hal ini mengatur pelaksanaan agama melalui badan atau institusi yang dibentuknya agar tidak terjadi sesuatu di luar keinginannya, seperti disharmoni atau disintegrasi sosial karena perbedaan agama. Sikap pemerintah semacam inilah yang dapat dilihat sebagai ‘sekularisme strategis’ pemerintah, kalau bukan sebuah sikap yang bersifat standar ganda (*double standard*).

Bagaimana sesungguhnya sikap negara terhadap Islam dan pemeluknya? “Konstitusi Republik independen mencakup dua ketentuan mengenai kedudukan komunitas Melayu dan Islam, yaitu: Pasal 152 dan pasal 15”.

Pasal 152 menyatakan:

“Menjadi tanggung jawab Pemerintah terus-menerus untuk merawat kepentingan minoritas rasial dan agama di Singapura. Pemerintah melaksanakan fungsi untuk memahami posisi khusus Melayu, yang merupakan penduduk asli Singapura, dan karena itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, melestarikan, mendukung,

¹²⁰. M. Hill & K.F. Lian, *The Politics of Citizenship and Nation Building in Singapore*, (London: Routledge, 1995).

¹²¹. Eugene K.B. Tan, ‘Norming, “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’.

¹²². Wawancara dengan Dr. Isa Hassan, , Vice President III Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore

¹²³. Li-ann Thio, *Secularism, the Singapore Way*, Straits Times, 30 Oktober 2007.

mendorong dan mempromosikan mereka di bidang politik, pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial dan budaya dan bahasa Melayu”.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini tidak bermaksud secara berlebihan menganakemaskan Melayu, melainkan pemerintah yang secara proporsional berupaya memelihara *balancing* antara penduduk asli dan pendatang. Dukungan pemerintah terhadap kepentingan minoritas Melayu-Muslim terlihat misalnya dalam pidato Perdana Menteri pada *National Day Rally 2013* sebagaimana berikut:

“Singapura kini berada di satu titik peralihan. Dalam dunia yang sedang berubah, kita mahu Singapura terus menjadi titik merah yang bersinar-sinar. Setiap kita ada peluang untuk maju dan tingkatkan diri, di sekolah mahupun dalam kehidupan. Anda semua jangan bimbang tentang soal penjagaan kesihatan atau hari tua. Janganlah bimbang tentang perumahan. Setiap orang boleh miliki rumah sendiri yang dimampui. Kita perlu ada semangat kekitaan di sini. Singapura milik kita, untuk kita bangunkan dan banggakan. Bersama-sama, kita boleh melakukannya! Untuk capai matlamat ini, kita perlu mengubah beberapa dasar ke atas pendekatan kita. Negara perlu kukuhkan jaringan keselamatan sosial dan pupuk peluang-peluang lebih adil dan menguntungkan untuk semua rakyat Singapura. Sebagai sebuah masyarakat, kita harus lebih aktif, berusaha mengatasi keperluan sosial kita dan bantu satu sama lain. Perubahan dasar ini juga diterapkan dalam usaha untuk tingkatkan masyarakat Melayu-Islam. Pemerintah akan tambah usaha untuk perbaiki kehidupan semua rakyat Singapura khususnya melalui perumahan, penjagaan kesihatan, dan pendidikan. Kita mahu baiki kehidupan keluarga susah. Setiap anak harus ada peluang baik untuk mulakan hidup mereka tidak kira latar belakang keluarga. Dasar-dasar ini adalah untuk semua masyarakat tetapi ada banyak faedah untuk masyarakat Melayu/Islam. Dasar-dasar kita ini akan membantu tingkatkan mobiliti sosial masyarakat Melayu/Islam dan membolehkan golongan susah keluar dari lingkaran kemiskinan”.¹²⁴

Lebih jauh PM Lee juga menambahkan:

“Masyarakat Melayu-Islam adalah contoh baik bagaimana sebuah masyarakat yang aktif boleh berjaya mencapai sesuatu. Badan-badan Melayu/Islam misalnya sedang giat mengatasi keperluan sosio-ekonomi masyarakat. Forum Pemimpin Masyarakat atau CLF, bekerjasama dengan badan Melayu/Islam untuk melakar program yang efektif. Satu contoh ialah Rangkaian Keluarga AKRAB yang bantu keluarga bergaji rendah dan anak-anak mereka untuk majukan diri”.¹²⁵

¹²⁴ . Website Prime Minister Office Singapura, “ *Prime Minister Lee Hsien Loong’s National Day Rally 2013* ”, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2013. Pidato ini disampaikan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada tanggal 18 Agustus 2013 dan disiarkan melalui radio dan televisi Singapura.

¹²⁵. *Ibid.*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstitusi Singapura menempatkan Melayu yang nota bene Muslim pada posisi istimewa. Konstitusi itu (pasal 152) secara eksplisit menyebutkan bahwa “menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, mendukung, mengangkat dan mempromosikan pendidikan, agama, kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahasa Melayu”. Pada kenyataan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro-Islam yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro-Islam antara lain adalah seperti larangan azan menggunakan *loud speaker*, larangan menggunakan tudung kepala (jilbab); penataan tempat tinggal (*New Strait Settlement*) yang berdampak pada lemahnya kohesitas Muslim dalam mengamalkan Islam secara berjamaah; tidak ada pelajaran agama di sekolah; serta ketertinggalan dan pencitraan Melayu Muslim sebagai orang yang tertinggal (*left behind*). Tidak hanya itu, kontradiksi lainnya dengan Konstitusi Singapura pasal 152 itu adalah bahwa pemerintah memproklamkan Singapura sebagai negara sekuler.

Secara umum ‘sekuler’ dipahami bahwa negara menjadi netral dalam permasalahan agama; tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Agama menjadi urusan pribadi dan pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Namun di sisi lain, pemerintah mengatur pelaksanaan Islam melalui organisasi keagamaan seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Pergas, *Muhammadiyah Association*, dan *Jamiyah*. Selain itu, pemerintah juga melakukan kontrol secara ketat terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam dengan menerapkan beberapa undang-undang dan regulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait cara pandang dan sikap pemerintah terhadap Islam –secara konstitusional– Melayu diakui sebagai penduduk asli dari tanah Melayu dan pemerintah memiliki kewajiban untuk "melindungi, mendukung, mengangkat dan mempromosikan, pendidikan, agama, kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka serta bahasa Melayu. Namun demikian, realitas geopolitik tidak dapat diabaikan oleh negara Singapura yang didominasi Cina di wilayah yang didominasi wilayah Melayu / Muslim, diapit oleh negara-negara mayoritas Muslim. Di samping itu, Singapura juga memiliki pengalaman pahit dalam sejarahnya terkait konflik etnis. Sejarah dan kedekatan dengan negara tetangga Malaysia menambahkan dimensi lain untuk dinamika ini. Ditambah lagi oleh klaim konstan pemimpin Melayu bahwa Melayu Singapura terpinggirkan dan harus memperoleh hak-hak mereka. Semua ini semakin merumitkan hubungan antara pemerintah dan Muslim Singapura.

Karena itu, salah satu sikap dan kecenderungan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan multirasialisme. Lahirnya paham multikulturalisme dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Singapura. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme diharapkan pemerintah menjadi suatu ideologi, yang menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan

penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Dengan demikian, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat diartikulasikan menjadi sejumlah kebijakan kultural yang memberi penekanan pada penerimaan realitas religiusitas, multicultural dan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga dapat dimengerti sebagai pandangan dunia yang diimplementasikan dalam kesadaran politik.

Dengan demikian, sikap dan kebijakan pemerintah Singapura terhadap Islam –baik yang terkesan pro maupun kontra– tidak disebabkan oleh karena masalah agama itu sendiri atau karena keyakinannya terhadap agama tertentu dan cenderung mengabaikan agama lain, tetapi lebih disebabkan oleh alasan untuk menjaga stabilitas dan harmoni antar warga negara yang musti ras dan multi etnik. Multirasialisme tidak hanya berfungsi untuk mengenali perbedaan-perbedaan rakyat yang berbeda ras dan agama tetapi bahkan memeliharanya. Kebijakan multirasial Singapura di beberapa bagian, telah mencapai tujuan utamanya, terutama dalam meningkatkan kohesi sosial. Sementara di sisi lain, juga membawa beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dalam rangka mengelola agama, pemerintah Singapura menggunakan berbagai tehnik untuk mengelola agama. Satu diantaranya adalah dengan mengkooptasi (memilih) badan dan organisasi keagamaan baik secara formal maupun informal untuk membantu memainkan peran pemerintah dalam mengelola agama. Sehingga tidak terlihat pemerintah mengelola agama secara langsung. Dalam proses kooptasi, ada badan atau organisasi yang dikooptasi. Dengan kata lain, badan atau organisasi yang dipilih membiarkan diri mereka dikooptasi/dipilih. Kooptasi tidak berarti hubungan tunduk atau seluruh prosesnya negatif; melainkan hanyalah strategi yang sering digunakan baik oleh negara maupun badan yang kurang kuat yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekali lagi, baik negara maupun lembaga yang dikooptasi sama-sama berupaya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

Badan dan organisasi yang dipilih/dikooptasi oleh pemerintah untuk memainkan perannya dalam mengelola agama di antaranya adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yaitu birokrasi agama yang disponsori negara dengan status badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola urusan agama Islam; Persatuan Guru Agama Islam (PERGAS); Persatuan guru agama Islam yang dibentuk oleh negara; Jamiyah (Muslim Missionary Society Singapore; Muhammadiyah Association

Pengaturan dan Pengawasan Ketat terhadap kegiatan keagamaan dilakukan dengan menerapkan beberapa regulasi dan undang-undang, antara lain : 1. Undang-Undang Pemeliharaan Harmoni Agama (MHRA) dimaksudkan untuk kepentingan menjaga 'kerukunan beragama' dan menjamin agama tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik atau tujuan subversif; 2. *Internal Security Act* (ISA); 3. Undang-undang Keamanan dalam Negeri merupakan bagian yang tidak lazim pada suatu undang-undang, yang mana penahanan dapat dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah Singapura melakukan kewaspadaan yang tinggi ketika berhadapan dengan Islam sehingga kemudian memilih untuk mengatur pelaksanaan agama Islam, mengkooptasi organisasi keagamaan serta mengawal pelaksanaan agama dengan undang-undang dan regulasi yang ketat. *Pertama*, karena sistem kepercayaannya yang luas (komprehensif), Islam berpotensi dapat digunakan sebagai titik kumpul terhadap beberapa kebijakan negara. *Kedua*, pemerintah benar-benar percaya bahwa peningkatan religiusitas Muslim berhubungan langsung dengan peningkatan aktivitas teroris. Selain itu, alasan mengapa pemerintah perlu mengatur urusan agama: *pertama* karena mereka tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa keragaman agama (multi-religi) tanpa pengelolaan dan pengaturan yang baik, cenderung menyebabkan ketegangan sosial (communal tensions) kalau bukan konflik sosial. *Kedua*, karena tak dapat dipungkiri bahwa agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas dan kewarganegaraan yang baik.

Seperti apakah karakteristik sekularisme Singapura? Secara teoritis, Charles Taylor mengemukakan tiga jenis sekularisme. *Pertama*, definisi sekularisme yang sering dikutip, yaitu pemisahan agama dari politik atau arena publik, atau dalam konteks Barat, pemisahan gereja dan negara. *Kedua*, sekularisme merujuk pada berkurangnya kepentingan keyakinan dan agama. *Ketiga*, sekularisme bisa berarti penggantian agama dengan sistem kepercayaan. Agama masih memainkan peranan penting dalam kehidupan sebagian besar warga Singapura dan dengan demikian, proposisi kedua dan ketiga tidak pas atau tidak dianut dalam konteks Singapura. Sekularisme yang dipraktekkan di Singapura adalah yang paling mirip dengan tipe pertama yang disebutkan oleh Taylor.

Pandangan bahwa 'pemerintah Singapura adalah sekuler, tetapi hal ini tidak berarti tidak ateis' menggambarkan tentang paham sekularisme strategis pemerintah, karena faktanya lebih dari 80% warga Singapura memeluk agama. Pemerintah terlihat menerapkan standar ganda (*double standard*) dalam hubungannya dengan Islam. Di satu sisi pemerintah menyatakan diri sebagai negara sekuler, namun faktanya pemerintah mengatur secara ketat dan sangat mengawasi pelaksanaan agama, terutama Islam.

Lalu, jenis Islam yang manakah yang dapat menjamin terbinanya hubungan yang baik antara Islam dengan negara di Singapura? Pemerintah mengizinkan dan bahkan mendorong pengamalan agama selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan agar agama tidak masuk ke ranah politik dan selama tidak mengancam keharmonisan antar warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Ibrahim, "*Hijab in an Age of Fear: Security, Secularism and Human Rights*," Australian Religious Studies Review, 2006
- Abdullah, Taufiq dan Sharon Shiddiqie (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1988.
- Abdullah, Walid Jumblatt, *Religious Representation in Secular Singapore : A Study of MUIS and Pergas*, (Thesis for the Degree of Master of Social Sciences, Departement of Social Sciences, National University of Singapore, 2012.

- Abdillah, Masykuri, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993*, Hambur: Abera Verlag, 1997.
- Ahmat, Sharom & James Wong (ed.), *Malay Participaton in the National Development of Singapore*, (Singapore: Central Council of Malay Cultural Organisations Singapore, 1971.
- Asad, Talal, *Formation of Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford: Stanford University Press, 2003
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London and New York: Routledge, 1991.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung, Mizan, 1994
- , *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, 2007
<http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20ayyumardi%20azra.htm>
- Berger, Peter L. et al., *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999.
- Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1998
- Chua, B. H, *Political Legitimacy and Housing: Stakeholding in Singapore*, London, Routledge, 1997
- Chong, Elena 'Couple Go on Trial for Sedition', *Straits Times*, 5 December 2008.
- Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*, (Boston: Little Brown and Company, 1970.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998.
- Federspiel, Howard M., *Muslim Intellectuals and National Development*, New York: Nova Science Publisher, 1991.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Press, 1985.
- Hashemi, Nader, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*, Oxford, New York: Oxford University Press, 2009
- Hefner, Robert W. *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press, 2001.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media Bandung, 2011.
- *Dinamika Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru, Suska Press, 2008.
- , "Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pangalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekuler dan Multikultural" dalam *Jurnal Toleransi*, Vol. 5 No. 2 Juli Desember 2013.
- , "Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura", *Laporan Penelitian*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- Hill, M. & K.F. Lian, *The Politics of Citizenship and Nation Building in Singapore*, (London: Routledge, 1995
- Hooker, M.B., *Islam in South-East Asia*, Leiden: E.J.Brill, 1988. Marshall G.S.

- Hodgson, Marshall G., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Vol. 1-111, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Jadidah, 1979.
- Jamsari, Ezad Azraai , “ Peranan dan Sumbangan Institusi Mesjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura” dalam *Journal of Islamic and Arabic Education* 2(2), 2010
- Kadir, Suzaina ‘Islam, State and Society in Singapore’, *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol.5, No.3, 2004.
- , Muslim Politics, the State and Society’, in Kenneth Paul Tan (ed.), *Renaissance Singapore?: Economy, Culture and Politics*, Singapore: NUS Press, 2007
- Kartodirdjo, Sartono , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, dari Imperium sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet V, 1999
- , *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Khan, Qamaruddin, *Political Concepts in the Quran*, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang, 1995
- , *Metodology Sejarah* , Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1994
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu, 2006.
- Maarif, Ahmad Syafii, “Islam as Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia”, *disertasi doktor*, University of Chicago, 1983.
- Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*, Routledge, 2003. Mutalib.
- Miller, David, *On Nationality*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mutalib, Hussin, *Singapore Malays, Being Ethnic Minority and Muslim in a Global City-State*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series, New York, 2012.
- , “Constructing a Constructive Opposition,” dalam *Impressions of the Goh Chok Tong Years in Singapore*, eds. Bridget Welsh, James Chin, Arun Mahizhnan and Tan Tarn How , Singapore: NUS Press, 2009.
- Nasir, Kamaludeen Mohammed, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, *Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies*, New York: Routledge, 2010.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES, 1996
- Osman, Fathi, “Parameters of the Islamic State”, *Arabia: The Islamic World Review*, No. 17, Januari 1983.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation State*, Cambridge; Cambridge University Press, 1986.
- Pereira, Alexius A. , Religiosity and Economic Development in Singapore, *Journal of Contemporary Religion*, Volume 20, No.2, 2005
- Rahim, Lily Zubaidah, dan Yunus Ali, *Dilema Singapura: Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu*, Kuala Lumpur, Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2004.

- Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*, Murdoch University and Asia Research Centre, Perth, Wester
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1982).
- , *Roots of Islamic Neo-Fundamentalism*, "Philip H. Stoddard, dkk (eds.), *Change and The Muslim World*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Rosta, Gergely, "Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe", dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm>
- Stepan, Alfred, *The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The "Twin Tolerations"*, dalam [https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML](https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project%20Manager%20-%20Constitution%20Process%20-%20Governance.EML).
- Smith, Donald Eugen, *Religion and Political Development*, Boston: Little Brown and Company, 1970.
- Suratman, Suriani, *Problematic Singapore Malays : the Making of Potrayal*, Makalah *Symposium Internasional* tentang "Thinking Malayness", Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ICCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 19-21 Juni 2004.
- Tan, Eugene K.B., 'Norming, "Moderation" in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore,' *Terrorism and Plitical Violence*, Vol.19, 2007
- Taylor, Charles, *A Secular Age*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
- Thio, Li-ann, *Secularism, the Singapore Way*, *Straits Times*, 30 Oktober 2007
- Tourres, Marie-Aimée, *The Politics of Multiculturalism*, *Review Southeast Asia*, IIAS Newsletter, Leiden, 30 Maret 2003.
- Tosh, John, *The Pursuit of History: Aims, Methodes and Directions in the Study of Modern History*, London and New York, Longman, 1986.
- Weyland, Petra, "International Muslim Networks and Islam in Singapore" dalam *Journal SOJOURN*, Social Issues in Southeast Asia, Vol 5 Number 2.
- Singapore Department of Statistics, *Pers Release : [Census of population 2010: Statistical Release 1 on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion](#)*.
- Report of the Constitutional Commision*, 1966 (Chairman: Wee Chong Jin), Singapore: Printed by the Government Printer, 1966, OCLC51640681.
- Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day RalyySpeech 2009 on 16 August* (transcript), pmo.gov.sg, diakses tanggal 28 Maret 2015.
- Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore", *Islam Online-net*, <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.
- "Singapore Malays Have Made Significant Progress " *The Straits Times*, 22 January 2001.
- "15 Nabbed Here for Terror Plans", *The Straits Times*, 6 January 2002.
- The Straits Times*, 26 January 2011.
- Lee Kuan Yew: *Hard Truths to Keep Singapore Going..*
- Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day Raly Speech 2009 on 16 August* (transcript), pmo.gov.sg, diakses tanggal 28 Maret 2015.
- Singapore Department of Statistics, *Singapore in Figures 2013*,
- Human Rights Watch (HWR) Country Report*, 2009.

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet.I, 1990.

Singapura 1999, (Singapura: Ministry of Information and the Arts, 1999

" Singapore Malays Have Made Significant Progress " *The Straits Times*, 22 January 2001.

15 Nabbed Here for Terror Plans, *The Straits Times*, 6 January 2002.

" Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day Rally 2013"

The Encyclopedia of Religion, vol. 13, New York: Macmillan Publishing Company.